

**PERUBAHAN POLITIK LUAR NEGERI UNI EMIRAT ARAB  
TERHADAP ISRAEL: ANALISIS PEMBUKAAN HUBUNGAN  
DIPLOMATIK  
S K R I P S I**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hubungan Internasional  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jayabaya



Disusun oleh:

**KRISTIAN FAJAR ZAI**  
**NIM 2017350750064**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JAYABAYA  
JAKARTA  
2021**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JAYABAYA  
JAKARTA 2021**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : **KRISTIAN FAJAR ZAI**  
NIM : **2017350750064**  
Jurusan : **Hubungan Internasional**  
Judul Skripsi : **PERUBAHAN POLITIK LUAR NEGERI UNI  
EMIRAT ARAB TERHADAP ISRAEL:  
ANALISIS PEMBUKAAN HUBUNGAN  
DIPLOMATIK**

Mengetahui:  
Ketua Program Studi,



**Dr. Umar Suryadi Bakry**

Jakarta, Agustus 2021

Dosen Pembimbing,



**Drs. Saiful Syam, M.Si, Ph.D**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JAYABAYA  
JAKARTA 2021**

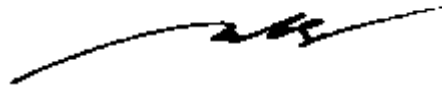
**TANDA PENGESAHAN UJIAN SIDANG**

Nama Lengkap : **KRISTIAN FAJAR ZAI**  
NIM : **2017350750064**  
Jurusan : **Hubungan Internasional**  
Judul Skripsi : **PERUBAHAN POLITIK LUAR NEGERI UNI  
EMIRAT ARAB TERHADAP ISRAEL: ANALISIS  
PEMBUKAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK**

Skripsi ini telah diuji sidangkan dihadapan Tim Penguji Program Studi Ilmu Hubungan Internasional sesuai dengan SK Dekan FISIP Universitas Jayabaya No. 18 Tahun 2021, 9 Agustus 2021 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

1. **Dr. Umar S. Bakry**  
Ketua
2. **Drs. Denny Ramdhanny M.Si**  
Penguji I
3. **Dr. Ambarwati**  
Penguji II
4. **Drs. Saiful Syam, M.Si, Ph.D**  
Pembimbing



Disahkan: Jakarta  
di Pada : \_\_\_\_Agustus 2021

Ketua Tim Ujian Sidang



**Dr. Umar S. Bakry**

## SURAT PERNYATAAN

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa:  
Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Jayabaya maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, bukan dibuat oleh pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 3 November 2021  
Yang membuat pernyataan,



**KRISTIAN FAJAR ZAI**  
NIM: 2017350750064

## **HALAMAN MOTTO**

**“Everything you can imagine is real”**

**- Pablo Picasso -**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Untuk kedua orang tuaku tercinta, yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Yang selalu mengingatkan untuk fokus pada satu hal dan juga harus selalu menjaga keluarga. Untuk ayah dan Ibu terimakasih banyak kalian telah memberikan yang terbaik untuk anakmu ini dan untuk saudara saya abang saya Penaliano Zai, Adik-Adik Saya Rikardo Zai, Yerikho Zai juag terimakasih banyak atas dukungannya yang selalu ada dan memberikan semangat dan sekali lagi untuk Ayah dan Ibu Saya Tercinta, ketahuilah bahwa anakmu sudah besar dan dewasa dan dengan semua usaha yang Ayah dan Ibu telah berikan, Kristian akan membalas dengan mengangkat seluruh martabat dan kehormatan keluarga kita.

Untuk Ayah dan Ibu terhebat, kalian sosok Orang tau yang paling aku dambakan dan hormati, Ayah dan Ibu telah berhasil membuat Kristian melaju ke jenjang akademik yang lebih tinggi dari Ayah dan Ibu yaitu perguruan tinggi. Ayah dan Ibu terus berusaha melalui segala masalah yang dialami, bagaimana pun caranya Kristian akan Berusaha dan selalu mengingat semua Nasehat dan Harapan ayah dan Ibu dan Kristian akan berjuang agar menjadi anak yang terbaik buat Ayah dan Ibu dan memenuhi semua Harapan Ayah dan Ibu selama ini dan sekali terimakasih banyak buat semua kasih sayangnya.

Kelurga adalah karunia terindah dari Tuhan, sejak awal kita lahir di dunia ini. Oleh karenanya, skripsi ini saya dedikasikan sepenuhnya kepada keluarga besar saya. Terima kasih atas doa dan dukungannya dalam proses belajar saya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas Semua Berkatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang sebuah Pembukaan Hubungan Diplomatik dan respon yang diberikan dalam lingkup internasional. Karya ini terinspirasi oleh aktifitas penulis yang menyukai dunia teknologi, walaupun bukan sebagai ahli teknologi, namun peneliti tertarik untuk membahasnya dalam diskursus Hubungan Internasional (HI). Peneliti memandang bahwa studi HI adalah bidang studi yang objeknya sangat luas, yang mempelajari semua bentuk hubungan dalam kehidupan sosial umat manusia yang bersifat lintas nasional. Oleh karena itu peneliti memilih isu ini sebagai topik yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai aktivitas spionase dan juga responnya.

Dengan kesadaran penulis atas minimnya penelitian-penelitian dengan isu-isu spionase ini, membuat penulis tertarik untuk menyumbangkan penelitian ini sekaligus memperkaya khazanah penelitian HI yang semakin kompleks dan beragam dewasa ini.

Dengan penuh rasa syukur serta kerendahan hati, penulis menyadari bahwa banyak pihak telah berperan serta sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Umar Suryadi Bakry selaku Ketua Program Studi HI Universitas Jayabaya. Terima kasih telah membuat mahasiswa HI

Universitas Jayabaya tidak kalah dengan mahasiswa HI Universitas lainnya dengan ilmu-ilmu yang bapak telah berikan.

2. Bapak Drs. Denny Ramdhany, M.Si, selaku Dekan FISIP Universitas Jayabaya yang dengan penuh dedikasi telah banyak berkontribusi terhadap pengembangan FISIP Universitas Jayabaya beserta organisasi mahasiswa FISIP yang telah penulis rasakan sendiri dampak positif kehadiran bapak. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah bapak berikan kepada penulis.
3. Bapak Drs. Saiful Syam, M.Si, Ph.D, selaku dosen pembimbing penulis yang banyak memberi saran, kritik serta beberapa referensi buku kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Berkat beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan juga memahami seni membuat karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tema skripsi penulis.
4. Jajaran dosen FISIP HI Universitas Jayabaya, Ibu Dr. Ambarwati, M.Si, Ibu Dr. Poppy Setiawati, Bapak Dr. Gema Nusantara Bakry, Bapak Drs. Syaiful Syam, M.Si Ph.D, Bapak Dr. Musa Alhabshy, Ibu Dr. Rosni Thamrin, SH, MH, dan dosen-dosen lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas limpahan ilmu dan waktunya selama masa perkuliahan.
5. Ayah, Ibu, Abang Penaliano Zai, Rikardo Zai, Yerikho Zai dan seluruh keluarga besar penulis dari yang selalu hadir memberikan keceriaan dan semangat sehingga lelah dan penat tidak terasa selama menyusun skripsi ini.



6. Teman-teman FISIP angkatan 2017 beserta seluruh masyarakat FISIP Universitas Jayabaya lainnya yang mendoakan dan memotivasi penulis.
7. Keluarga besar ORMAWA FISIP Universitas Jayabaya periode 2018-2019 yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman bagi penulis dalam berorganisasi.
8. Kakak-kakak dan abang-abang FISIP angkatan 2013 yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis agar dapat survive di dalam kampus.
9. Seluruh staf Universitas Jayabaya khususnya sekretariat FISIP yang telah banyak mengakomodasi dan melayani penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala doa, dukungan, semangat, dan motivasi yang tulus semasa kuliah di Universitas Jayabaya.
11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Akhir kata, penulis berharap Tuhan yang Maha ESA membalas kebaikan semua pihak yang telah berkontribusi, semoga karya ini bisa berguna dan menjadi pemacu bagi semua pembaca dan khususnya penulis pribadi. Karya tulis ini tentu saja ada kekurangannya, untuk itu kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan. Terimakasih.

Jakarta, Agustus 2021.



**KRISTIAN FAJAR ZAI**  
(Mahasiswa FISIP-HI Universitas Jayabaya)

## **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang perubahan politik luar negeri Uni Emirat Arab terhadap Israel dengan Analisis Pembukaan Hubungan Diplomatik. Perubahan Politik Luar negeri Uni Emirat Arab dalam Pembukaan Hubungan Diplomatik Terhadap Israel menarik untuk diteliti. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui alasan Perubahan Politik Luar negeri Uni Emirat Arab terhadap Israel dalam Pembukaan Hubungan Diplomatik. Selain itu, penulisan penelitian ini bertujuan agar dapat menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan politik luar negeri Uni Emirat Arab terhadap Israel dalam Pembukaan Hubungan Diplomatik.

Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Dipaparkan secara deduktif dengan kerangka teori politik luar negeri, konsep pembukaan hubungan diplomatik dan kepentingan nasional. Teori tersebut dapat menjawab adanya perubahan politik luar negeri Uni Emirat Arab terhadap Isarel, dan Kepentingan Nasional menjadi alasan utama perubahan politik luar negeri Uni Emirat Arab dalam perjanjian pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel

**Kata Kunci:** Pembukaan Hubungan Diplomatik, Kepentingan Nasional.

## **ABSTRACT**

*This thesis discusses the changes in the foreign policy of the United Arab Emirates towards Israel with the Analysis of the Opening of Diplomatic Relations. Changes in the Foreign Policy of the United Arab Emirates in the Opening of Diplomatic Relations with Israel is interesting to study. The purpose of this thesis research is to find out the reasons for the Changes in Foreign Policy of the United Arab Emirates towards Israel in the Opening of Diplomatic Relations. In addition, the purpose of this research is to analyze the factors that influence the changes in the foreign policy of the United Arab Emirates towards Israel in the Opening of Diplomatic Relations.*

*This study is a qualitative research using descriptive analysis techniques. Deductively presented with the framework of foreign policy theory, the concept of opening diplomatic relations and national interests. This theory can answer the changes in the United Arab Emirates' foreign policy towards Israel, and the National Interest is the main reason for the change in the United Arab Emirates' foreign policy in the agreement to open diplomatic relations with Israel.*

*Keywords: Opening of Diplomatic Relations, National interest.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SIDANG</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Kerangka Analisis .....	17
G. Metode Penelitian.....	18
H. Defenisi Konseptual .....	19
I. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN POLITIK LUAR NEGERI UNI EMIRAT ARAB</b>	
A. Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab Terhadap Kawasan Timur Tengah .....	26
B. Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab Terhadap Amerika Serikat.....	30
C. Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab Terhadap Israel Sebelum Pembukaan Hubungan Diplomatik.....	33

**BAB III    UNI EMIRAT ARAB DALAM KONSTELASI POLITIK TIMUR  
TENGAH**

A. Konflik Uni Emirat Arab-Iran .....	43
B. Intervensi Uni Emirat Arab Terhadap Konflik Regional Timur Tengah .....	47
C. Uni Emirat Arab Terhadap Konflik Arab-Israel.....	55

**BAB IV    ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI  
PERUBAHAN POLITIK LUAR NEGERI UNI EMIRAT ARAB  
TERHADAP PEMBUKAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK  
DENGAN ISRAEL**

A. Faktor Politik dan Keamanan .....	59
B. Faktor Mediasi Amerika Serikat .....	67
C. Faktor Palestina .....	73

**BAB V    KESIMPULAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

**BIODATA SINGKAT**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada akhir tahun 2020 sebuah kesepakatan damai terjadi dalam hubungan internasional dimana Israel dan beberapa negara arab di kawasan timur tengah yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko hendak melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel dan pembukaan hubungan diplomatik negara-negara arab terhadap Israel tersebut menjadi menjadi pembukaan hubungan diplomatik bersejarah di kawasan timur tengah, saat ini diantara ketiga negara tersebut yang telah melakukan pembukaan diplomatik adalah uni emirat arab dimana pembukaan hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Israel diumumkan pada tanggal 13 agustus 2020 oleh presiden Amerika Serikat Donald Trump dan perjanjian ini dikenal sebagai Abraham Accord.<sup>1</sup>

Perjanjian ini secara langsung di umumkan oleh presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bentuk kesepakatan perdamaian antara Israel yang diwakili oleh perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Uni Emirat Arab yang diwakili oleh presiden Uni Emirat Arab Khalifa bin Zayed Al Nahyan dan perjanjian kedua negara ini dalam pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara dapat dilakukan secara bertahap dan diharapkan dapat menciptakan perdamaian di kawasan timur tengah.

---

<sup>1</sup> Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, "Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya dengan Israel", Middle East Islamic Studies, vol 7, 2020.

Sejak Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948 Israel telah mendapatkan pertentangan dari negara-negara Arab sehingga sehari setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaannya lima gabungan negara-negara Arab yang terdiri dari Mesir, Suriah, Lebanon, Irak dan Yordania menyatakan perang terhadap Israel dan pernyataan perang ini menjadi perang pertama negara-negara Arab terhadap Israel. Kemerdekaan Israel mendapatkan penolakan dari negara-negara Arab dikarenakan Israel mendeklarasikan kemerdekaannya di atas wilayah Palestina yang menurut negara-negara Arab Israel tidak mempunyai hak untuk mendeklarasikan kemerdekaannya di atas wilayah Palestina tersebut sehingga penolakan-penolakan negara-negara Arab terhadap kemerdekaan Israel di wilayah Palestina tersebut yang menyebabkan gejolak konflik antara negara-negara Arab dan Israel terus terjadi dan Israel tidak mendapatkan pengakuan sebagai negara-negara Arab sebagai negara yang merdeka karena negara-negara Arab mempunyai solidaritas untuk memerdekakan Palestina.<sup>2</sup>

Kemerdekaan Israel akhirnya mencapai babak baru pada tahun 1979 dimana pada tahun tersebut Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Israel dan negara Arab pertama yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel pengakuan terhadap Israel disusul oleh Yordania pada tahun 1994 dan hubungan diplomatik antara negara Israel, Mesir dan Yordania ini menjadi titik balik bagi Israel dalam perjuangan politiknya dalam mendapatkan pengakuan dan hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab lainnya.

Faktor-faktor politik yang terdapat dalam sebuah pembukaan hubungan diplomatik membuat setiap negara tidak akan selalu dengan bebas dalam

---

<sup>2</sup> *Ibid*



menentukan kebijakannya dalam membuka hubungan diplomatik dengan negara lain karena pembukaan hubungan diplomatik sebuah negara dengan negara lain harus melalui pertimbangan yang tepat karena harus memikirkan dampak politik dari kebijakan untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, pertimbangan-pertimbangan akan dampak politik tersebut yang membuat banyak negara-negara di dunia yang seharusnya merdeka dan dapat diakui sebagai negara merdeka dengan mendapatkan pengakuan dari negara lain terhalang oleh kepentingan-kepentingan dari negara lain sehingga dalam praktek pembukaan hubungan diplomatik negara yang lain secara langsung akan mengakui negara tersebut sebagai negara yang berdaulat dan negara yang mengakui dan membuka hubungan diplomatik tersebut harus bertanggung jawab akan kebijakan politik yang di ambilnya.<sup>3</sup>

Kepentingan politik setiap negara dalam membuka hubungan diplomatik dengan negara lain dapat dilihat dari beberapa fenomena pembukaan hubungan diplomatik dalam hubungan internasional seperti negara Israel yang dimana Israel tidak bisa dengan mudah dalam mendapatkan pengakuan dari beberapa negara karena terbentur oleh kepentingan-kepentingan politik negara lain yang dianggap akan mengganggu atau bahkan akan membahayakan negara lain apabila negara tersebut mendapatkan pengakuan dari negara lain, karena dalam hukum internasional pembukaan hubungan diplomatik dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan kedaulatan dan bentuk telah terjalinnya hubungan baik antara kedua negara yang bersangkutan hal ini dikarenakan sebuah negara tidak bisa membuka atau melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain apabila negara yang

---

<sup>3</sup> Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, "Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya dengan Israel", *Middle East Islamic Studies*, vol 7, 2020. Hal 217.

melakukan hubungan diplomatik tidak memiliki posisi yang sama sebagai objek dalam hukum internasional atau apabila kedua negara tidak memiliki hubungan baik.<sup>4</sup>

Perjanjian pembukaan hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Israel ini mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat internasional dimana beberapa negara menyambut baik perjanjian tersebut seperti Kanada, Mesir, Inggris dan Bahrain, namun disisi lain tidak sedikit negara yang mengkritik perjanjian tersebut seperti negara Iran, Turki, Oman dan Qatar.<sup>5</sup> Perbedaan pandangan negara-negara internasional dalam melihat perjanjian yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan Israel ini tidak lepas dari kepentingan negara-negara tersebut dalam hal ini Kanada menyebut bahwa perjanjian tersebut adalah Langkah positif menuju perdamaian dan keamanan bagi kawasan timur tengah.

Beberapa kelompok aktivis, kelompok masyarakat dan negara lain memprotes perjanjian tersebut contohnya presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumpulkan para pemimpin dan pejabat Palestina dan komite Palestine Liberation Organization (PLO) sebagai sebuah komite yang bertujuan untuk memperjuangkan pembatasan Palestina dari Israel untuk menolak penuh keputusan Uni Emirat Arab tersebut. Bahkan PLO menarik duta besarnya dari Abu Dhabi dan menyerukan kepada konferensi tingkat tinggi KTT Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menolak perjanjian tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Lynda Asiana, *Hukum dan Kebijakan Ekonomi: Studi Kasus One China Policy*, Pena Justisia, vol 7, no 1 (2017). Hal. 3.

<sup>5</sup> Merdeka.com, Q&A: Seluk Beluk Normalisasi Hubungan Israel dan UEA dan Bahrain, (23 September 2020), <https://www.merdeka.com/khas/qa-seluk-beluk-normalisasi-hubungan-israel-dangan-uea-dan-bahrain.html>. [Diakses 4 Mei 2021].

<sup>6</sup> Kompas.com, Israel-UEA Jalin Kembali Hubungan Diplomatik Ini Respon Ini Respon Beberapa Negara, (14 Agustus 2020), <https://www.kompas.com/global/read/2020/08/14/144524370/israel-uea-jalin-kembali-hubungan-diplomatik-ini-respons-beberapa-negara?page=all>, [Diakses 4 Mei 2020].

Perubahan sikap politik luar negeri Uni Emirat Arab dalam membuka hubungan diplomatik dengan Israel adalah kebijakan dengan tujuan jangka panjang dalam strategi politik luar negeri Uni Emirat Arab dalam menjaga stabilitas negaranya terhadap gangguan internal dan eksternal serta terhadap keadaan politik, keamanan, dan ekonomi kawasan regional timur tengah yang tidak stabil dengan banyaknya permasalahan-permasalahan seperti konflik, perang saudara, isu terorisme dan gerakan-gerakan separatis dari berbagai negara di timur tengah yang dikhawatirkan akan mempengaruhi dan berdampak pada politik dan keamanan Uni Emirat Arab.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, melalui penelitian ini penulis bermaksud mengidentifikasi kepentingan Uni Emirat Arab terhadap Israel serta menganalisis respon negara-negara muslim lainnya terkait kebijakan pembukaan hubungan diplomatik, serta bagaimana dampaknya terhadap solidaritas negara-negara muslim dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Perubahan politik luar negeri Uni Emirat Arab terhadap Israel dipengaruhi oleh beberapa determinan dalam politik luar negeri dimana saat ini Uni Emirat Arab sedang dalam tekanan dan memiliki kepentingan nasional yang lebih penting daripada kebersamaan dalam solidaritas dalam kerjasama dengan negara-negara arab lainnya dimana keadaan politik dan keamanan regional kawasan timur tengah memiliki pengaruh besar dalam perubahan politik luar negeri Uni Emirat Arab dimana saat ini ancaman kekuatan dari Iran dan gerakan-gerak terorisme maupun gerakan radikalisme menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional Uni Emirat Arab.

---

<sup>7</sup> William A. Rugh, *The Foreign Policy of the United Arab Emirates*, Jurnal Timur Tengah, Vol. 50, No. 1 (Winter, 1996), hal. 54.

## **B. Rumusan Masalah**

Perjanjian normalisasi dalam membuka Hubungan diplomatik Uni Emirat Arab-Israel adalah sebuah kebijakan luar negeri yang baru pertama kali dilakukan oleh negara Arab pada abad ke 21 ini dimana sebelumnya negara arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel adalah Mesir dan Yordania sehingga membuat posisi Uni Emirat Arab menjadi negara ketiga yang melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel.

Negara-negara kawasan timur tengah Sebagian besar adalah negara yang kontra dengan keberadaan Israel dikarenakan negara-negara menganggap Israel adalah negara yang tidak seharusnya merdeka di atas tanah palestina sehingga mayoritas negara Islam di dunia terutama negara-negara Arab yang islam mempunyai solidaritas dan tujuan yang sama dalam menolak eksistensi kemerdekaan Israel di timur tengah, dan berdasarkan asumsi dan solidaritas negara-negara islam timur tengah ini yang membuat hubungan negara-negara arab dan Israel tidak memiliki hubungan yang baik.

Berdasarkan dari paparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu ***“Mengapa Uni Emirat Arab melakukan hubungan diplomatik dengan Israel”***

## **C. Pembatasan Masalah**

Penulisan yang baik tentunya memiliki pembatasan masalah agar penelitian ini dapat dibahas dengan maksimal, serta dilakukan agar penelitian dimaksudkan untuk memudahkan penelitian dalam mencari sumber data dan menganalisa dengan baik sesuai dengan teori yang di gunakan. Agar lebih memfokuskan dan memperjelas tujuan penelitian ini maka penulis memberi batasan penelitian yaitu,

mengapa Uni Emirat Arab melakukan hubungan diplomatik dengan Israel: dan analisis perubahan kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab terhadap Israel sampai pembukaan hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Israel.

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian maka kegunaan penelitian ini adalah:

##### 1. Tujuan Praktis

Menganalisis perubahan politik luar negeri Uni Emirat Arab terhadap Israel dalam kesepakatan pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara. Dan menambah wawasan penulis dalam melihat fenomena internasional dalam perspektif yang berbeda.

##### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan sebagai persyaratan kelulusan dalam program Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Jayabaya. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat menambah wawasan baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi para pembaca.

#### **E. Kerangka Teori**

##### 1. Teori Politik Luar negeri

Joshua Goldstein menjelaskan bahwa pengertian politik luar negeri adalah strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan tindakan mereka dalam dunia internasional.<sup>8</sup> Sedangkan menurut K. J. Holsti, politik luar negeri merupakan tindakan atau gagasan yang dirancang untuk

---

<sup>8</sup> Joshua Goldstein, *International Relations*, Longman, New York, (1999), hal. 147.

memecahkan masalah atau membuat perubahan dalam politik.<sup>9</sup> Berdasarkan definisi tersebut, politik luar negeri dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh negara berupa perilaku dan gagasan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah serta dalam rangka memenuhi kepentingan nasional suatu negara dalam politik internasional.

Setiap negara mempunyai tujuan berbeda dalam melakukan politik luar negerinya, akan tetapi negara dalam melakukan politik luar negerinya memiliki tujuan dalam rangka memenuhi dan mencapai kepentingan pribadi maupun kepentingan kolektifnya. Pada umumnya negara melaksanakan politik luar negerinya agar dapat memberikan pengaruh terhadap negara lain, menjaga keamanan nasional, dan dalam memiliki prestise serta keuntungan bagi negaranya. Menurut Rossenau, tujuan dari politik luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun dan tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masalah dan aspirasi untuk masa yang akan datang.<sup>10</sup> Sedangkan menurut K.J. Holsti, dua tujuan yang dominan dalam negara melakukan politik luar negerinya adalah dengan tujuan menengah dan jangka panjang.

Tujuan jangka menengah yaitu untuk meningkatkan prestise suatu negara dalam sistem internasional karena peningkatan prestise dinilai berdasarkan pada industry, teknologi, ekonomi, dan militer. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah tentang rencana, impian serta pandangan mengenai ideologi dalam sistem internasional, dan ideologi tersebut merupakan aturan

---

<sup>9</sup> K.J. Holsti, *International Politic: A Framework for Analisis, Prentice-Hall*, New Jersey, (1983), hal. 107.

<sup>10</sup> James N. Ronesau, *International Poltics and Foerign Policy: A Reader in Research and Theory*, The Free Press, New York, (1969), hal. 167.

yang mengatur tindakan negara dalam sistem internasional.<sup>11</sup> Bagi Rosennau tujuan jangka panjang negara melaksanakan politik luar negeri adalah untuk perdamaian, kekuasaan, dan keamanan.<sup>12</sup>

Politik luar negeri juga dipengaruhi oleh dua determinan, yakni determinan internal dan eksternal. Determinan internal meliputi : (1) kebijakan sosial-ekonomi dan keamanan, kebijakan luar negeri sangat bergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan internal suatu negara, (2) letak geografis mempengaruhi citra suatu negara pada dunia internasional, hal ini berkaitan dengan daya pikat negara tersebut, (3) struktur pemerintahan, berkaitan dengan bagaimana pihak pemerintah mengambil suatu kebijakan dalam politik luar negeri demi kepentingan nasionalnya, (4) Birokrasi, berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan politik luar negeri yang diambil oleh suatu negara, (5) Atribut Nasional, berkaitan dengan karakteristik negara yang meliputi jumlah produk, perkembangan ekonomi serta aktivitasnya dalam dunia internasional.<sup>13</sup> Sedangkan determinan eksternal meliputi: (1) Struktur Sistem, pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh struktur dan sistem internasional, (2) Struktur Ekonomi Global, (3) Tujuan dan Tindakan aktor lain merupakan respon atas tindakan aktor lain sehingga negara memiliki tujuan terarah demi mencapai kepentingan nasionalnya, (4) Masalah Regional, jika suatu negara

---

<sup>11</sup> K.J. Holsti. *Op.cit.* Hal 146-147.

<sup>12</sup> James N. Ronesau. *Op.cit.* Hal. 167.

<sup>13</sup> K. J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, Prentice Hall. Inc, Angelwood Clipps, New Jersey, 1997, hal. 271-287.

mendapat masalah dalam suatu kawasan maka akan berdampak juga terhadap negara lain.<sup>14</sup>

Penulis dalam penelitian ini melihat faktor yang mempengaruhi politik luar negeri Uni Emirat Arab terhadap Israel sebelum pembukaan hubungan diplomatik hingga terciptanya perjanjian pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 2020. Penulis akan melihat dan menganalisa pada fakto-faktor yang dijelaskan oleh Holsti dimana faktor Internal dan faktor eksternal sangat mempengaruhi politik luar negeri Uni Emirat Arab akan tetapi dari semua faktor-faktor tersebut penulis hanya akan menganalisa beberapa faktor yang dianggap dominan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab. Faktor-faktor yang dimaksud adalah masalah regional dan global, kebijakan sosial-ekonomi dan keamanan, struktur pemerintahan dan birokrasi. Penulis menganggap bahwa faktor-faktor tersebut paling berpengaruh dalam perubahan politik luar negeri Uni Emirat Arab dalam pembukaan hubungan diplomatiknya dengan Israel.

## 2. Konsep Pembukaan Hubungan Diplomatik

Pembukaan hubungan diplomatik pada dasarnya harus berdasarkan asas kesepakatan Bersama antara kedua belah pihak (*Mutual Consent*) atau antara kedua negara yang melakukan pembukaan hubungan diplomatik.<sup>15</sup> Terlebih lagi di era hubungan internasional kontemporer ini membuat ketergantungan suatu negara dengan negara lain semakin besar dimana hal ini terjadi negara juga dianggap memiliki ketergantungan yang tidak bisa memenuhi segala kebutuhannya sendiri sehingga negara harus memiliki

---

<sup>14</sup> K. J. Holsti, *Ibid*, hal. 271-287.

<sup>15</sup> Nicholas Tandi Dammen, "Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri journal," *Hukum Internasional* 2 no. (2005): 713.



kemampuan dalam melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhannya ataupun dalam mencapai tujuan nasionalnya.<sup>16</sup> Dalam melakukan hubungan diplomatik tidak semua entitas dapat disebut sebagai objek ataupun subjek dalam hukum internasional dimana menurut konvensi Montevideo 1933 sebuah negara dapat di kualifikasikan sebagai subjek dalam hukum internasional dan layak untuk melakukan hubungan diplomatik dengan subjek internasional lainnya apabila negara tersebut memenuhi beberap kriteria diantaranya, penduduk yang permanen, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.<sup>17</sup>

Prinsip utama bagi negara-negara dalam melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain harus berjalan tanpa paksaan, tekanan ataupun pengawasan dari negara manapun karena dalam hukum internasional negara adalah subjek hukum internasional sehingga negara-negara dalam melakukan interaksinya harus dipadang setara dengan kedudukan yang sama tanpa diskriminasi dan bebas dalam melakukan kerjasama dengan negara manapun, prinsip ini diatur dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pasal 1 (ayat 2) yang berbunyi “ mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar dalam memperteguh perdamaian Universal”<sup>18</sup> dengan piagam PBB ini negara-negara di dunia diharapkan akan mengembangkan hubungan

---

<sup>16</sup> Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta (2016).

<sup>17</sup>F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta (1994)..

<sup>18</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, n.d.

persahabatan dengan negara lain dengan tetap menghargai prinsip-prinsip kesetaraan demi menjaga perdamaian yang Universal.

Terciptanya hubungan diplomatik merupakan suatu Langkah awal bagi sebuah negara dalam mencari hubungan kerjasama yang baik antara kedua negara yang biasanya pembukaan hubungan diplomatik akan ditindak lanjuti dengan pembukaan kantor kedutaan serta mengirim perwakilan diplomatik negara yang melakukan hubungan diplomatik ke masing-masing negara sebagai bukti telah terjalinnya hubungan diplomatik.<sup>19</sup> Pengiriman perwakilan diplomatik adalah hak setiap negara yang berdaulat yang kedaulatannya telah diakui oleh negara-negara di dunia serta dunia internasional dimana hak dalam pengiriman perwakilan diplomatik ini disebut sebagai hak *Right of Legation* atau hak legasi sebuah negara dalam mengirimkan perwakilan diplomatiknya terhadap negara yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan negaranya. Hak legasi ini telah diatur dalam konvensi Havana pada tahun 1928 pasal 1 yang berbunyi “untuk menerima dan meningkatkan ke dan dari negara lain bukan merupakan suatu keharusan melainkan kesepakatan antara kedua negara”.<sup>20</sup> Dengan demikian pengiriman perwakilan diplomatik bukan merupakan suatu keharusan namun lebih ke niat baik antar kedua negara dalam hal saling menjaga hubungan baik serta kerjasama yang lebih efisien.

Konvensi Wina tahun 1961 dalam pasal 2 juga menjelaskan bahwa *The Establishment of Diplomatic Relations Between State, and of Permanent Diplomatic Mission, Takes Place by Mutual Consent*. Yang artinya

---

<sup>19</sup> Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, “Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya dengan Israel”, *Middle East Islamic Studies*, vol 7, 2020. Hal 217.

<sup>20</sup> F. Sugeng Istanto, *Op,cit*

pembukaan hubungan diplomatik antara negara dan pembukaan perwakilan tetap diplomatik dilakukan atas saling kesepakatan.<sup>21</sup> Kesepakatan antara kedua negara dapat berupa perjanjian persahabatan, komunique Bersama dan sebagainya. Dalam konvensi Wina 1961 dijelaskan bahwa pembukaan hubungan diplomatik dan pembukaan perwakilan tetap merupakan dua hal berbeda, dimana hal ini merujuk pada faktor politik yang dalam pembukaan hubungan diplomatik dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan kemerdekaan suatu negara terhadap negara lain. Faktor politik tentang pembukaan hubungan diplomatik sebagai bentuk pengakuan ini yang menjadi masalah dan pertimbangan bagi negara-negara di dunia dalam menentukan kebijakannya untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara lain.<sup>22</sup>

Faktor-faktor politik yang terdapat dalam sebuah pembukaan hubungan diplomatik membuat setiap negara tidak akan selalu dengan bebas dalam menentukan kebijakannya dalam membuka hubungan diplomatik dengan negara lain karena pembukaan hubungan diplomatik sebuah negara dengan negara lain harus melalui pertimbangan yang tepat karena harus memikirkan dampak politik dari kebijakan untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, pertimbangan-pertimbangan akan dampak politik tersebut yang membuat banyak negara-negara di dunia yang seharusnya merdeka dan dapat diakui sebagai negara merdeka dengan mendapatkan pengakuan dari negara lain terhalang oleh kepentingan-kepentingan dari negara lain sehingga dalam praktek pembukaan hubungan diplomatik negara yang lain secara langsung akan mengakui negara tersebut

---

<sup>21</sup> Lihat konvensi Wina 1961 pasal 2.

<sup>22</sup> konvensi Wina, *ibid*

sebagai negara yang berdaulat dan negara yang mengakui dan membuka hubungan diplomatik tersebut harus bertanggung jawab akan kebijakan politik yang di ambilnya.<sup>23</sup>

Kepentingan politik setiap negara dalam membuka hubungan diplomatik dengan negara lain dapat dilihat dari beberapa fenomena pembukaan hubungan diplomatik dalam hubungan internasional seperti negara Israel yang dimana Israel tidak bisa dengan mudah dalam mendapatkan pengakuan dari beberapa negara karena terbentur oleh kepentingan-kepentingan politik negara lain yang dianggap akan mengganggu atau bahkan akan membahayakan negara lain apabila negara tersebut mendapatkan pengakuan dari negara lain, karena dalam hukum internasional pembukaan hubungan diplomatik dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan kedaulatan dan bentuk telah terjalinnya hubungan baik antara kedua negara yang bersangkutan hal ini dikarenakan sebuah negara tidak bisa membuka atau melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain apabila negara yang melakukan hubungan diplomatik tidak memiliki posisi yang sama sebagai objek dalam hukum internasional atau apabila kedua negara tidak memiliki hubungan baik.<sup>24</sup>

### 3. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah komponen penting dalam politik luar negeri suatu negara dalam hubungan internasional. Menurut Felix E. Oppenheim, kepentingan nasional merupakan tujuan sebuah negara atau pemerintah suatu negara di tingkat internasional untuk mencapai

---

<sup>23</sup> Sugeng F. Istanto. *Op.cit.* Hal 217.

<sup>24</sup> Lynda Asiana Hukum, Hukum dan Kebijakan Ekonomi: Studi Kasus One China Policy, Pena Justisia, vol. 7 no. 1 (2017). Hal. 3.

kesejahteraan bagi warganya seperti untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan wilayah negaranya.<sup>25</sup> Kepentingan nasional tidak digambarkan sebagai tujuan khusus saja, tetapi juga sama seperti kebijakan. Sebagai contoh, kebijakan tentang perdagangan bebas termasuk dalam kepentingan nasional. Selain itu, kepentingan nasional juga meliputi berbagai bidang seperti ekonomi dan keamanan.<sup>26</sup>

Beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan kepentingan nasional. Hans J. Morgenthau menjelaskan bahwa kepentingan nasional adalah alat untuk mengejar kekuasaan, karena melalui kekuasaan suatu negara dapat mengontrol negara lain.<sup>27</sup> Untuk mencapai kepentingan nasional, maka kebijakan-kebijakan luar negeri digunakan untuk mengatur negara agar lebih terarah dalam melakukan hubungan dengan negara lain dalam hubungan internasional, sedangkan Aleksius Jemadu, mengutip dari Miroslav Nincic menjelaskan tiga asumsi dasar kepentingan nasional, yaitu *Pertama* kepentingan tersebut bersifat esensial yang dalam pencapaiannya harus menjadi prioritas utama pemerintah. *Kedua* kepentingan nasional juga berkaitan dengan lingkungan atau keadaan internasional jadi pencapaian kepentingan nasional tersebut berkaitan dengan lingkungan internasional saat itu. *Ketiga* kepentingan

---

<sup>25</sup> Felix E. Oppenheim (1987), *Political Theory: National Interest, Rationality, and Morality*, Vol. 15, No. 3, Sage Publications Inc, California, 1987 hal. 369.

<sup>26</sup> Miroslav Nincic, *The review of Politics: The National Interest and Its Interpretation*, Vol. 61, No. 1, Cambridge University Press, Cambridge, (1999), hal. 29.

<sup>27</sup> Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Alfred A Knopf Inc., 5, New York, (1985), hal. 265.

nasional tidak boleh memihak kepada salah satu instansi atau pihak manapun melainkan harus mewakili seluruh aspirasi masyarakat.<sup>28</sup>

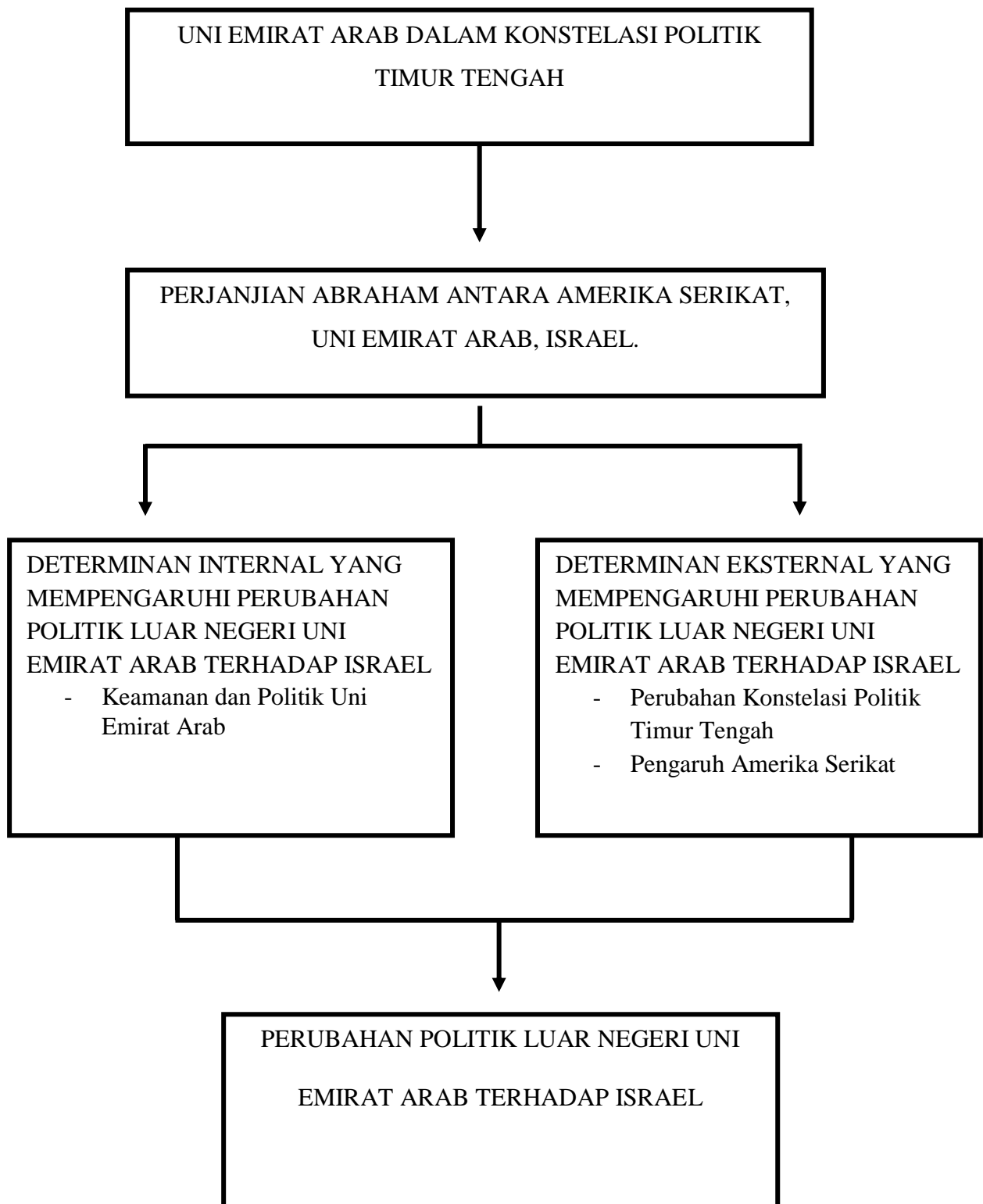
Thomas W. Robinson mengklasifikasikan kepentingan nasional menjadi enam kategori yaitu: (1) *Primary Interest*, merupakan kepentingan nasional yang permanen dan negara harus melindunginya dengan segenap tenaga dan tidak dapat dikompromikan seperti melindungi keamanan negara dan identitas nasional. (2) *Secondary Interest*, muncul apabila primary interest telah terpenuhi misalnya memastikan kekebalan diplomatik bagi staf diplomatik dan perlindungan warga negara di luar negeri. (3) *Permanent Interest*, merujuk pada kepentingan nasional yang bersifat konsisten dalam periode waktu tertentu. (4) *Variable Interest*, kepentingan nasional yang dianggap penting pada suatu keadaan tertentu berdasarkan opini public atau keadaan politik dalam negeri. (5) *General Interest*, merujuk pada kepentingan nasional yang berkaitan dengan perilaku positif berdasarkan luas dan letak geografis, jumlah penduduk, serta beberapa aspek meliputi perdagangan dan ekonomi. (6) *Specific Interest*, merujuk pada kepentingan yang spesifik dalam suatu waktu dan tempat tertentu.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, (2008), hal. 67.

<sup>29</sup> W.Thomas Robinson, *A National Interest Analysis Of Sino-Soviet Relations*, University of Arizona, Arizona, (1967), hal. 183.

## F. Kerangka Analisis



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa suatu peristiwa oleh karena itu penulis menggunakan metode deskriptif dikarenakan untuk mencari tau mengapa Uni Emirat Arab membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis pada penelitian ini terdiri dari dua metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

- a. Metode Berbasis Dokumen (*Document-Based Research*) merupakan metode yang paling sering digunakan. Dimana metode berbasis dokumen adalah metode yang dilakukan dengan mendapatkan data berupa dokumen atau arsip tertentu. Dokumen adalah setiap bahan yang menyediakan informasi tentang fenomena sosial tertentu yang keberadaannya secara independen dari tindakan peneliti. Dokumen yang dimaksud dalam metode ini adalah dokumen yang berbentuk data primer (*Primary Source Documents*) dan dokumen sekunder (*Secondary Source Documents*).<sup>30</sup>
- b. Metode Berbasis Internet merupakan salah satu metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan mengumpulkan informasi faktual tentang topik atau informasi atas peristiwa tertentu yang ingin kita acari guna mendukung penelitian. Metode ini memanfaatkan situs berita yang

---

<sup>30</sup> Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 171.



tersedia, dan akses artikel atau arsip tertentu dan informasi data-data lainnya yang dibutuhkan.

### 3. Metode Analisis Data

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan teknik kualitatif. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai teknik penulisan yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren. Penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena, aktivitas-aktivitas, dan proses-proses sosial. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada makna (*Meaning*) dan pemahaman (*Understanding*) daripada kuantifikasi.<sup>31</sup> Menurut Liz Spencer, penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, perspektif dan sejarah orang dalam konteks dan sering ditandai dengan *concern* untuk menemukan perspektif aktor dengan metode konteks-sensitif dan semi-terstruktur, kaya dengan data, penjelasan di tingkat makna serta bagaimana dan mengapa pertanyaan diajukan.

## H. Defenisi Konseptual

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah seringkali ditemukan istilah-istilah yang sering memiliki defenisi yang tidak jelas. Berikut akan dijelaskan istilah-istilah tersebut:

### 1. Pembukaan Hubungan Diplomatik

Pembukaan hubungan diplomatik adalah Langkah awal bagi sebuah negara untuk menjalani hubungan diplomatik secara resmi dimana

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

pembukaan hubungan diplomatik bisa terjadi dengan hanya adanya perjanjian serta tanpa harus memulai hubungan diplomatik secara resmi, dalam hukum internasional sebuah hubungan diplomatik yang secara resmi adalah dengan dibukanya kantor kedutaan serta mengirimkan perwakilan diplomatik di masing-masing negara yang melakukan hubungan diplomatik namun dalam konsep pembukaan hubungan diplomatik sebuah negara tidak harus membuka kantor kedutaan dan mengirimkan perwakilan diplomatik ke masing-masing negara karena dalam praktek pembukaan hubungan diplomatik bukanlah hubungan diplomatik yang resmi.

## **2. Hubungan Diplomatik**

Hubungan diplomatik merupakan salah satu instrument dalam hubungan luar negeri yang menjadi kebutuhan setiap negara. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut negara-negara untuk melakukan suatu kerjasama dengan negara lain. Pada umumnya negara-negara yang memiliki hubungan baik saling memiliki kepentingan dan keinginan untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik.<sup>32</sup>

Sehingga dengan adanya hubungan diplomatik maka kerjasama negara dengan negara lain dalam hubungan internasional akan berjalan dengan baik dimana sebuah hubungan diplomatik akan selalu berkaitan dengan bagaimana sebuah negara mempermudah diplomasinya dengan negara-negara lain dengan membuka kantor kedutaan serta mengirimkan perwakilan diplomatiknya ke negara lain dengan tujuan dengan adanya kantor kedutaan dan perwakilan diplomatik di negara lain dapat mempermudah sebuah negara

---

<sup>32</sup> Setyo Widagdo, Hanif Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, 2008, Malang, Bayu Media Publishing, Hal 56.

dalam menjalin hubungan yang baik dalam melakukan kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral serta mempermudah pelaksanaan politik luar negeri suatu negara terhadap negara lain.

### 3. Politik Luar Negeri

Pengertian dasar yang harus kita ketahui bahwa politik luar negeri pada dasarnya merupakan "*Action Theory*" atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara-negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Dalam pengertian umum politik luar negeri "*Foreign Policy*" merupakan suatu perangkat atau formula dari nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional setiap negara dalam panggung politik internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara terhadap isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.<sup>33</sup> Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri adalah dengan jalan memisahkannya ke dalam dua komponen politik dan luar negeri.

Politik adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga politik itu berakar pada konsep pilihan dalam memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan sedang luar negeri adalah keadaan atau sesuatu hal yang berkaitan dengan segala aspek di luar kedaulatan suatu negara jadi

---

<sup>33</sup> Ceramah Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Sesko TNI AU) Angkatan ke-44 TP 2007, Bandung, 16 Mei 2007.

politik luar negeri merupakan tindakan atau keputusan-keputusan suatu negara dalam berhubungan dengan dunia luar.

Dalam hubungan internasional politik luar negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak hanya melibatkan aspek-aspek eksternal suatu negara namun juga melibatkan aspek-aspek internalnya.<sup>34</sup> Negara sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memiliki peran penting dalam hubungan internasional. Dalam kajian politik luar negeri sebagai sebuah sistem atau rangasangan dari lingkungan eksternal dan domestic sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara yang akan di presepsikan oleh para pembuat keputusan dalam konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimiliki sebuah negara.<sup>35</sup>

#### **4. Kerjasama Bilateral dan Multilateral**

Kerjasama bilateral menurut *Cambridge English Dictionary*, kerjasama bilateral adalah situasi dimana dua negara atau organisasi memiliki perjanjian perdagangan atau bekerjasama untuk mencapai sesuatu. Sedangkan menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani menjelaskan bahwa kerjasama bilateral adalah keadaan yang menggambarkan hubungan

---

<sup>34</sup> James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 15.

<sup>35</sup> James N. Rosenau, 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press, hal. 171, 173.

timbang balik antara kedua belah pihak yang terlibat dan aktor utama dalam kerjasama bilateral adalah negara. Dengan demikian kerjasama bilateral hubungan antara dua pihak atau hubungan antara dua negara yang tujuannya untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Istilah kerjasama bilateral biasanya di aplikasikan pada persoalan politik, ekonomi, dan keamanan antara dua negara dan kerjasama bilateral ini terjadi apabila kedua negara memiliki hubungan diplomatik serta saling menempatkan perwakilan diplomatik di masing-masing negara, kerjasama bilateral biasanya terjadi dan ditentuka atas tiga motif yaitu: untuk memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian dan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.<sup>36</sup>

Kerjasama multilateral menurut *Cambridge English Dictionary*, merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari dua kelompok atau negara. Kerjasama multilateral tidak dibatasi oleh kawasan tertentu karena kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang atau perkembangan perekonomian suatu negara.<sup>37</sup>

## 5. Diplomasi

Diplomasi menurut Adam Barston merupakan bentuk manajemen hubungan antara negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya,<sup>38</sup> dalam hubungan internasional diplomasi dapat diartikan sebagai cara komunikasi yang dilakukan oleh negara-negara melalui perwakilan diplomatiknya disebuah perundingan atau pertemuan resmi untuk tujuan tertentu. Diplomasi juga dapat mewakili tekanan politik,

---

<sup>36</sup>Kompas.com, "Bentuk Kerja Sama Internasional: Bilateral, Regional, dan Multilateral", (19Desember2019, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/19/180000269/bentuk-kerja-sama-internasional-bilateral-regional-multilateral?page=all>, [Diakses 5 Mei 2021].

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Adam Barston, *The Dialog Between States*, London, (1984), hal. 223.

ekonomi dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi yang biasanya di formulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi para pelaku negosiasi.<sup>39</sup> Diplomasi ini bisa juga diaplikasikan dalam keadaan damai maupun keadaan perang dimana dalam diplomasi sebuah negara dapat menyampaikan seruan perdamaian dan juga dapat menyampaikan ultimatum perang namun dalam hubungan internasional diplomasi lebih digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara damai.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sebagai upaya dalam memudahkan penelitian, maka disusunlah penulisan ini secara sistematis dan mendetail dalam lima bab.

Adapun sistematika penulisan yang dipergunakan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN.**

Pada bab ini, penulis menjabarkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka analisis, definisi konseptual, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM POLITIK LUAR NEGERI UNI EMIRAT ARAB.**

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang tinjauan umum politik luar negeri Uni Emirat Arab terhadap mitra strategisnya dalam politik luar negeri terhadap kawasan timur tengah, Amerika Serikat dan politik luar negeri Uni

---

<sup>39</sup> Erick Clark, *The World of International Diplomacy*, Taplinger New York, (1973), hal. 83.

Emirat Arab terhadap Israel sebelum pembukaan hubungan diplomatik dengan gambaran umum secara spesifik.

### **BAB III UNI EMIRAT ARAB DALAM KONSTELASI POLITIK TIMUR TENGAH.**

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang konstelasi politik timur tengah dan pengaruhnya terhadap Uni Emirat Arab.

### **BAB IV ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN POLITIK LUAR NEGERI UNI EMIRAT ARAB DALAM PEMBUKAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK TERHADAP ISRAEL.**

Pada bab ini, penulis akan membahas analisis faktor determinan internal dan eksternal yang mempengaruhi perubahan politik luar negeri Uni Emirat Arab dalam pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel.

### **BAB V KESIMPULAN**

Pada bab ini, penulis akan memuat hasil dari temuan penelitian serta jawaban dari perumusan masalah yang disusun oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN POLITIK LUAR NEGERI UNI EMIRAT ARAB

#### A. Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab Terhadap Kawasan Timur Tengah

Fokus utama Politik luar negeri Uni Emirat Arab terhadap kawasan timur tengah adalah keanggotaannya dalam Dewan Kerjasama Teluk GCC (*Gulf Cooperation Council*) yang didirikan pada tahun 1981 dengan anggota terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait dan Oman. Keterlibatan Uni Emirat Arab dalam GCC di bentuk dalam menjaga kepentingan keamanan negara-negara teluk serta bertujuan untuk menjaga stabilitas regional dan negara-negara yang bergabung dalam GCC juga mempunyai kekhawatiran yang sama terhadap Iran yang terus meningkatkan kekuatan militernya dan memaksakan pengaruh dan hegemoninya di kawasan regional timur tengah sehingga negara-negara GCC menganggap bahwa Iran adalah negara yang harus di waspadai kekuatan militernya sehingga dengan ancaman dari Iran tersebut juga yang membuat negara-negara yang tergabung dalam GCC meningkatkan kekuatan militer dan mempererat kerjasama pertahanan antar negara-negara anggota GCC dalam membendung kekuatan militer iran yang makin membesar.<sup>40</sup>

Uni Emirat Arab memiliki prioritas utama dalam menjaga keamanan nasional dari ancaman-ancaman luar di kawasan terutama ancaman dari negara tetangganya Iran dimana Uni Emirat Arab dan negara-negara GCC lainnya menganggap Iran sebagai ancaman terbesar dalam kawasan timur tengah.

---

<sup>40</sup> Mitchel A. Belfer, Iranian Claims to Bahrain: From Rhetoric to Interference, RIPS 13, no. 2, 2014.



Hubungan Uni Emirat Arab dengan Iran tidak memiliki hubungan yang baik karena memiliki perselisihan teritorial yang cukup rumit dan berkepanjangan, sengketa wilayah teritorial anatar Uni Emirat Arab dan Iran terkait dengan klaim tiga pulau di selat Hormuz yakni pulau Abu Musa, Tunb, dan Lesser Tunb.

Ketiga pulau tersebut memiliki posisi strategis di teluk Persia karena ketiga pulau tersebut menjadi jalur pelayaran utama di teluk Persia dan selat Hormuz.<sup>41</sup> Sengketa atas ketiga pulau tersebut dimulai pada tahun 1971 dimana dalam sebuah nota kesepahaman negara bagian emirat Sharjah setuju dengan kepemilikan wilayah dengan kehadiran militer Iran didalam penciptaan negara Federal Uni emirat Arab sehingga pada saat itu ketiga pulau tersebut dibawah kendali Teheran,<sup>42</sup> namun setelah Uni Emirat Arab berdiri dan Sharjah menjadi negara bagian dari Uni Emirat Arab membuat Abu Dhabi tidak pernah menerima perjanjian antara Sharjah dan Iran tersebut sebagai perjanjian yang sah sehingga perselisihan antara Uni Emirat Arab dan Iran pun terus berlangsung dengan serangkaian upaya mediasi yang gagal.<sup>43</sup>

Perseteruan antara Uni Emirat Arab dan Iran terus berlangsung hingga pada tahun 2010 menteri luar negeri Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed menyebut bahwa “kendali Iran terhadap pulau-pulau tersebut adalah tindakan yang memalukan dan menbandingkan situasi tersebut dengan pendudukan Israel atas wilayah Arab yang disita pada tahun 1967” meskipun pada saat itu menteri luar negeri Uni Emirat Arab tersebut menambahkan bahwa “saya tidak membandingkan

---

<sup>41</sup> Karim Sadjadpour, *The Battle of Dubai: The United Arab Emirates and the U.S-Iran Cold War*, Cornege Endowment for International Piece, Juli, 2011, hal, 10.

<sup>42</sup> Nima Adelkhah, *Low Level Boundary Dispute Intensifies as Iran and the UAE Context Control of Strategic Gulf Islands*, The Jamestown foundations, Mei, 2012.

<sup>43</sup> Mohammed Abdullah Al Roken, *Dimensions of the UAE-Iran Dispute Over Three Islands*, in *United Arab Emirates: A New Prespective*, ed Ibrahim Abed and Peter Hellyer, London, 2001.

Iran dengan Israel".<sup>44</sup> Pihak Teheran pun menanggapi pernyataan Menteri luar negeri Uni Emirat Arab tersebut dengan menganggap bahwa ketiga pulau tersebut bagian yang sangat diperlukan dan tidak bisa dipisahkan dari wilayah nasionalnya dan menuduh Uni Emirat Arab beserta GCC terlalu ikut campur terhadap urusan internal Iran<sup>45</sup>, meskipun hubungan Uni Emirat Arab dan Iran tidak memiliki hubungan yang baik katas sengketa tersebut namun situasi ketegangan kedua negara atas konflik sengketa tersebut tidak pernah sampai pada situasi yang buruk menjadi kekerasan dan konflik bersenjata.

Menanggapi perselisihan antara Uni Emirat Arab dan Iran membuat GCC dan Liga Arab turut ikut andil dengan membawa perselisihan sengketa tersebut harus diselesaikan dengan baik dan dibawa ke hadapan Mahkamah Internasional dan PBB namun dalam proses Arbitase tersebut Iran bersikeras bahwa pulau-pulau tersebut adalah bagian dari wilayah kedaulatannya dan Iran menindaklanjuti klaim tersebut Ketika pada tahun 2012 presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dengan mengunjungi salah satu pulau yang di sengketakan<sup>46</sup> serta kunjungan panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran dan beberapa pejabat lainnya di pulau-pulau tersebut dengan tujuan mendirikan pangkalan Angkatan Laut serta membahas tentang membawa pariwisata di salah satu pulau tersebut.<sup>47</sup> Klaim Iran beserta aksinya dalam mengunjungi pulau-pulau yang

---

<sup>44</sup> Mahmoud Habboush, Iran Occupation of Gulf Islands "Shameful Minister". Says Minister, The National, april, 2010, <https://www.thenationalnews.com/uae/iran-s-occupation-of-gulf-islands-shameful-says-minister-1501>, [Diakses 26 Mei 2021].

<sup>45</sup> Karim Sadjadpour, *Opcit.*

<sup>46</sup> Thomas Erdbrink, A Tiny Island is Where Iran Makes a Stand, The New York Times, [https://www.nytimes.com/2012/05/01/world/middleeast/dispute-over-island-of-abu-musa-unites-iran.html?\\_r=0](https://www.nytimes.com/2012/05/01/world/middleeast/dispute-over-island-of-abu-musa-unites-iran.html?_r=0) April 2012. [Diakses 26 Mei 2021].

<sup>47</sup> Joanna Paraszczuk, Iran Inaugurates New Naval Base in Strait of Hormuz, The Jerusalem Post, November, 2012, <https://www.jpost.com/Iranian-Threat/News/Iran-inaugurates-new-naval-base-in-Strait-of-Hormuz>, [Diakses 26 Mei 2021].

disengketakan membuat hubungan Uni Emirat Arab dan Iran kembali mengalami ketegangan hubungan bilateral yang serius dan menghambat rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik.

Kebijakan-kebijakan regional Iran telah menjadi perhatian serius dari negara teluk dan GCC dan terutama Uni Emirat Arab sebagai negara yang memiliki perselisihan serius dengan Iran dan pihak Uni Emirat Arab telah menyatakan keprihatinan yang sangat besar terhadap kebijakan-kebijakan yang di ambil Iran yang semakin mendominasi kawasan dengan segala campur tangan Iran di berbagai konflik di timur tengah di antaranya konflik yang sedang terjadi di Yaman, Suriah, Irak, Lebanon, Bahrain dan beberapa tempat lainnya yang sering kali dalam konflik tersebut pihak Iran dan negara-negara Arab lainnya termasuk Uni Emirat Arab memiliki banyak pertentangan yang serius sehingga Uni Emirat Arab beserta negara-negara teluk lainnya terutama negara-negara yang bergabung dalam GCC telah menganggap Iran dengan segala kebijakan-kebijakannya sebagai ancaman serius.<sup>48</sup>

Kekuatan Militer Iran telah menjadi sebuah ancaman yang serius bagi Uni Emirat Arab beserta mitra kerjasamanya GCC sehingga Uni Emirat Arab beserta GCC telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi dan menekan pengaruh Iran di berbagai tempat konflik di kawasan timur tengah yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas kawasan. Kekhawatiran Uni Emirat Arab dan negara teluk lainnya pun makin meningkat dengan kemampuan rudal beserta pengembangan Nuklir yang sedang dilakukan Iran yang semakin meningkat sehingga pada

---

<sup>48</sup> Eddie Boxx, Countering the Iranians Missile Threat in the Middle East, Washington Institute fo Near East Policy, Oktober, 2012, <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/countering-iranian-missile-threat-middle-east>, [Diakses 26 Mei 2021].

perjanjian nuklir internasional dengan Iran dalam forum *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) yang diumumkan pada 14 juli 2015 membuat Uni Emirat Arab menyatakan reservasi serius terhadap kesepakatan pengembangan nuklir Iran<sup>49</sup> namun dalam perundingan KTT Camp David pada 14 mei 2015 antara Uni Emirat Arab beserta mitra GCC dengan presiden Obama berhasil membuat Amerika Serikat menegaskan komitmennya dalam mendukung stabilitas keamanan teluk serta menentang kebijakan-kebijakan regional Iran dan memberikan jaminan-jaminan lainnya.<sup>50</sup>

Pada pertemuan perdana menteri luar negeri Amerika Serikat dengan negara-negara GCC yang dilaksanakan di Qatar pada tanggal 3 agustus 2015 Uni Emirat Arab beserta negara-negara anggota GCC lainnya sepakat dalam sebuah perjanjian kelompok untuk menekan perlu menjaga stabilitas keamanan dan stabilitas teluk dan kawasan dengan menekan Iran untuk mengubah perilaku serta kebijakan-kebijakannya di dalam kawasan regional dan berharap Iran mengubah kebijakan-kebijakan regionalnya dalam mewujudkan halaman baru terhadap stabilitas negara-negar teluk dan regional.<sup>51</sup>

## **B. Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab Terhadap Amerika Serikat**

Menurut Stockhlom International Peace Research Institute, Uni Emirat Arab adalah negara dengan pengeluaran militer terbesar ke 15 di dunia pada tahun 2013

<sup>49</sup> U.S. Department of State, “*Joint Comprehensive Plan of Action*,” July 14, 2015, <https://www.state.gov/>. [Diakses 27 Mei 2021].

<sup>50</sup> The White House, “*U.S. – Gulf Cooperation Council Camp David Joint Statement*,” Mei, 2015, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/05/14/us-gulf-cooperation-council-camp-david-joint-statement>, [Diakses 27 Mei 2021].

<sup>51</sup> Qatar News Agency , “*Joint Statement of US-GCC Foreign Ministers’ Meeting*,” Agustus, 2015, <http://www.qna.org.qa/en-us/News/15080401100067/Joint-Statement-of-US-GCC-Foreign-Ministers-Meeting>, [Diakses 27 Mei 2021].

dengan anggaran militer senilai \$ 22 miliar dollar pada tahun 2014. Anggaran militer dengan nilai yang begitu besar bagi sebuah negara kecil seperti Uni Emirat Arab merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab dalam menjaga keamanan nasionalnya dengan menjadi negara importir alutsista militer terbesar ketiga di dunia pada tahun 2015 dengan mitra utamanya dalam transfer alutsista adalah negara Amerika Serikat dengan rasio sebesar 70 persen alutsista militer Uni Emirat Arab berasal dari negara Amerika Serikat.<sup>52</sup>

Hubungan kerjasama bilateral Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat dalam bidang keamanan dan militer diklaim sebagai kerjasama militer terbaik Amerika Serikat di dunia Arab dimana mantan komandan Pasukan Amerika Serikat di timur tengah Anthony Zinni mengatakan kepada The Washington Post bahwa “kerjasama pertahanan Amerika Serikat-Uni Emirat Arab adalah hubungan kerjasama militer terkuat Amerika Serikat di dunia Arab saat ini”.<sup>53</sup> Dan pada Desember 2016 menteri pertahanan Amerika Serikat Ash Carter mengatakan bahwa “Uni Emirat Arab memiliki hubungan bilateral yang sangat baik terhadap Amerika Serikat di Kawasan timur tengah dan menjadikan Uni Emirat Arab sebagai mitra utama Amerika Serikat dibidang pertahanan dan kerjasama militer”<sup>54</sup>.

Kemitraan kerjasama antara Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat Kembali di perkuat selama masa kepresidanan Donald Trump dimana para pejabat

---

<sup>52</sup> Pierre Bienaime, Armin Rosen, *The Most Powerful Army You've Never Head Of*, Business Insider, November 2016.

<sup>53</sup> Rajiv Chandra Sekaran, *In The UAE, the United States has a Quiet, Potent Ally Nicknamed Little Sparta*, The Washington Post, November 2014.

<sup>54</sup> Ash Carter, *Remarks on The Logic of American Strategy in the Middle East*, U.S Department of Defense, Desember, 2016.

Uni Emirat Arab menyatakan keinginan untuk meningkatkan kerjasama militer dengan Amerika Serikat dengan tujuan efisiensi dalam pembelian alutsista militer dan berharap dengan menjadi mitra pertahanan utama Amerika Serikat dapat menempatkan posisi Uni Emirat Arab sebagai sekutu no-NATO utama di kawasan timur tengah.<sup>55</sup>

Amerika Serikat tetap menjadi pusat kebijakan pertahanan Uni Emirat Arab. Pakta pertahanan dengan Amerika Serikat, dinegosiasikan setelah Perang Teluk 1991 dan ditandatangani pada tahun 1996, memungkinkan Amerika Serikat untuk memposisikan beberapa pasukan dan peralatan di Uni Emirat Arab dan memberikannya beberapa hak untuk menggunakan pangkalan udara di emirat. Pada tahun 2004 Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat menandatangani kontrak senilai US\$ 6,4 miliar untuk pengiriman 80 pesawat tempur F-16E/F Desert Falcon ke angkatan udara Uni Emirat Arab pada tahun 2007. Angsuran pertama, yang disampaikan pada April 2005, ditandai dengan upacara resmi profil tinggi. Hampir 1.000 personel Uni Emirat Arab berlatih di pusat penerbangan Angkatan Darat Amerika Serikat di Amerika Serikat.

Pada tahun 2003 Uni Emirat Arab, dalam konjungsi dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, mendirikan *Air Warfare Centre* di Pangkalan Udara Al Dhafra untuk berfungsi sebagai pusat pelatihan regional, termasuk pelatihan F-16 untuk Uni Emirat Arab dan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk lainnya. Meskipun signifikansi omelawan hubungan militer dengan Amerika Serikat, UEA telah mencari diversifikasi dalam pengadaan persenjataan. Prancis, dengan siapa UEA telah menegosiasikan perjanjian kerja sama pertahanan, tetap menjadi

---

<sup>55</sup> Kenneth Katzman, *The United Arab Emirates (UAE): Issues for U.S. Policy*, Congressional Research Service, Februari, 2017.

sumber utama matériel militer, sebagai saksi recent pembelian pesawat tempur Mirage 2000–9 dan kendaraan lapis baja ringan Panhard. Rusia, Jerman, dan Ukraina juga merupakan pemasok aktual atau potensial.

Kekuatan militer yang dimiliki Uni Emirat Arab telah menjadikannya sebagai salah negara dengan kekuatan militer yang disegani di kawasan timur tengah dimana saat ini Uni Emirat Arab memiliki Tentara Aktif sebanyak 64 ribu personel, Jet Tempur sebanyak 536, Kapal Perang sebanyak 75, Tank sebanyak 464, dengan anggaran militer pertahunnya sebesar 14,375 miliar dollar dengan mitra utama Amerika Serikat dimana Amerika Serikat mempunyai pangkalan militer yang tersebar di beberapa wilayah di Uni Emirat Arab seperti di Dhafra, Fujaira, dan Jabal Ali. <sup>56</sup>Dengan kekuatan militer yang dimilikinya saat ini Uni Emirat Arab telah muncul sebagai salah satu kekuatan regional kawasan yang disegani.

### **C. Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab Terhadap Israel Sebelum Pembukaan Hubungan Diplomatik**

Hubungan Uni Emirat Arab dan Israel di bidang keamanan sudah terjalin sejak lama jauh sebelum pembukaan hubungan diplomatik kedua negara dimana bidang keamanan adalah sektor penting bagi politik luar negeri Uni Emirat Arab, hubungan di bidang keamanan ini terlihat jelas sejak Iran berencana untuk mengembangkan senjata nuklir dan pengembangan senjata nuklir tersebut di waspadai oleh negara-negara di Kawasan timur tengah terutama Israel dan beberapa negara di Kawasan seperti Arab Saudi dan termasuk Uni Emirat Arab sehingga isu pengembangan

---

<sup>56</sup> Albalad.co, Kekuatan Militer Enam Negara Teluk, 2017, <https://albalad.co/kabar/2017A7278/kekuatan-militer-enam-negara-arab-teluk/>, [Diakses 27 Mei 2021].

senjata nuklir Iran tersebut di anggap sebagai ancaman nyata dan membahayakan bagi negara-negara di Kawasan timur tengah.

Pengembangan senjata nuklir Iran tersebut mendorong beberapa negara-negara di Kawasan timur tengah untuk melakukan lobby di Perserikatan Bangsa Bangsa dan akhirnya pada tahun 2012 perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato di sidang majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa dengan pidato “ garis merah” dengan tujuan untuk meminta kepada komunitas internasional untuk memperhatikan pengembangan nuklir Iran dan mencegah agar Iran tidak diberikan atau memperoleh uranium sebagai bahan utama senjata nuklir agar pengembangan senjata nuklir Iran dapat dihentikan demi keamanan dan stabilitas Kawasan dan stabilitas keamanan global, pidato yang disampaikan Netanyahu ini mendapat respon baik dari Uni Emirat Arab yang memiliki tujuan yang sama untuk menghentikan pengembangan nuklir Iran.

Pada tanggal 28 September 2012 pertemuan antara perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri luar negeri Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan sehari setelah pidato Netanyahu di majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa akhirnya terjadi di salah satu hotel di New York Amerika Serikat, dimana pada pertemuan tersebut pihak Israel dan Uni Emirat Arab membahas masalah pengembangan senjata nuklir Iran, namun pembahasan tersebut mengalami kendala dimana Netanyahu menyampaikan keinginan Israel untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan Uni Emirat Arab namun menteri luar negeri Uni Emirat Arab mengatakan bahwa negaranya tidak mungkin



untuk membangun hubungan yang baik dengan Israel selama tidak ada kemajuan dalam proses perdamaian antara Israel dan Palestina.<sup>57</sup>

Program nuklir Iran telah mendorong kepentingan politik Uni Emirat Arab terhadap Israel yang dimana kedua negara ini memiliki keberatan yang sama akan program nukli Iran yang menurut mereka program nuklir tersebut akan mengganggu stabilitas keamanan kawasan sehingga baik Uni Emirat Arab dan Israel sama-sama menolak dan keberatan atas program nuklir Iran dan kesepakatan nuklir dengan Iran.<sup>58</sup> Perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu pada sebuah kesenpatan di PBB pada tahun 2013 menyebut bahwa program nuklir Iran dan kesepakatan nuklir Iran sebagai ancaman regional yang nyata bagi Israel maupun negara-negara di kawasan timur tengah dan sekaligus membuka peluang kerjasama yang baik dengan dunia arab yang lebih luas demi menjaga kepentingan dan tantangan yang sama demi menciptakan masa depan yang lebih damai.<sup>59</sup>

Beberapa pihak menyakini bahwa Uni Emirat Arab dan negara-negara teluk lainnya tidak suka mengambil bagian aktif secara langsung dalam perselihan dengan Iran dan lebih baik untuk menyaksikan Israel bertempur langsung secara diplomatik dengan Iran bagaimanapun Uni Emirat Arab dan negara-negara teluk lainnya memiliki keberatan yang sama atas program nuklir Iran. karena saat ini

---

<sup>57</sup> Haaretz.com, "Exclusive: Netanyahu Secretly Met With UAE Foreign Minister in 2012 in New York," (25 July 2017), <https://www.haaretz.com/israel-news/netanyahu-secretly-met-with-uae-foreign-minister-in-2012-in-new-york-1.5432342>, [Diakses 9 Mei 2021].

<sup>58</sup> Uzi Rabi dan Chelsi Mueller, "Negara-Negara Teluk Arab dan Israel sejak 1967: Dari 'Tanpa Negosiasi' menjadi Kerjasama Tacit," *British Journal of Middle East Studies* 44 (4), 2017, hlm. 576-592.

<sup>59</sup> Kedutaan Besar Israel untuk Amerika Serikat, Pidato PM Netanyahu di PBB, 10 Januari 2013, <https://www.israelemb.org/washington/NewsAndEvents/Pages/PM-Netanyahu-Speech-at-the-UN.aspx>, [Diakses 29 Mei 2021].

Uni Emirat Arab memiliki ancaman lain selain program nuklir Iran yang ditimbulkan oleh organisasi teroris dan tren radikalisme yang menurut Uni Emirat Arab harus segera ditangani, organisasi dan tren radikalisme ini bersumber dari Gerakan sebuah organisasi islam radikal yakni gerakan Ikhwanul Muslimin dan berbagai cabangnya di seluruh kawasan regional timur tengah termasuk Uni Emirat Arab yang berpotensi menimbulkan ancaman politik dan stabilitas keamanan Uni Emirat Arab.<sup>60</sup>

Rincian tentang hubungan keamanan rahasia antara Israel dan Uni Emirat Arab telah mengungkapkan kemitraan tingkat tinggi yang telah membuat perusahaan milik Israel bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur penting di Abu Dhabi. Otoritas Emirat, telah menempatkan orang-orang Uni Emirat Arab dengan baik yang bekerja erat dengan perusahaan yang terlibat, telah mengontrak perusahaan keamanan milik Israel untuk mengamankan instalasi minyak dan gas di UEA serta untuk mendirikan jaringan pengawasan sipil yang unik secara global di Abu Dhabi dengan tujuan mengawasi setiap orang yang keluar masuk kedalam wilayah kedaulatan Uni Emirat Arab.<sup>61</sup>

Kerjasama Uni Emirat Arab dan Israel di bidang keamanan sipil juga telah lama terjalin dimana sebuah perusahaan milik pengusaha asal Israel Mati Kochavi dengan perusahaannya Asia Global Technology (AGT) memiliki kerjasama dalam sebuah proyek yang bernama "Falcon Eye", Proyek Falcon Eye adalah inisiatif

---

<sup>60</sup> Yoel Guzansky, "The Gulf States, Israel and Hamas," Anat Kurz, Udi Dekel dan Benedetta Berti (eds.), *The Crisis in the Gaza Strip: Response to the Challenge* (Tel Aviv: Institute for National Security Studies, 2018).

<sup>61</sup> MEE, *Secret flight linking Israel to the UAE reveals 'open secret' of collaboration*, Februari 2015, <https://www.middleeasteye.net/news/secret-flight-linking-israel-uae-reveals-open-secret-collaboration>, [Diakses 30 Mei 2021].

pengawasan seluruh emirat yang disetujui oleh Putra Mahkota Mohammed bin Zayed al-Nahyan dan beberapa pejabat penting Uni Emirat Arab.

Proyek Itu adalah awal dari hubungan yang menguntungkan untuk AGT dan sebagai perusahaan asal Israel untuk masuk kedalam sistem pertahanan dan keamanan sipil Uni Emirat Arab tetapi untuk mematuhi hukum Uni Emirat Arab perusahaan milik Israel tersebut membutuhkan mitra lokal dari Uni Emirat Arab, yang telah diidentifikasi sebagai Advanced Integrated Systems (AIS) dan Advanced Technical Solutions (ATS). Kesepakatan dalam kerjasama tersebut dilakukan pada tahun 2008 dan melibatkan tiga perusahaan tersebut untuk menyediakan "kamera pengintai, pagar elektronik dan sensor untuk memantau infrastruktur strategis dan ladang minyak" termasuk mengamankan perbatasan Uni Emirat Arab, untuk Otoritas Infrastruktur Nasional Kritis Abu Dhabi.<sup>62</sup>

Kemitraan bisnis tiga arah telah diselimuti kerahasiaan AGT tidak menyebutkan bekerja di UEA di situs web mereka dan AIS tidak memiliki platform online tetapi laporan pers lokal UEA telah mengisyaratkan hubungan kerja mereka. Situs berita yang berbasis di Dubai Emirates melaporkan pada tahun 2008 bahwa AGT telah diberikan kontrak untuk melindungi "aset penting" dalam kemitraan dengan AIS dan artikel tahun 2011 dari surat kabar berbahasa Inggris yang berbasis di UEA Khaleej Times mereferensikan kemitraan antara AIS dan ATS. Dua perusahaan UEA, AIS dan ATS, berbagi ruang kantor di lantai 23 Sky Tower di Pulau al-Reem di Abu Dhabi. Sumber MEE di Abu Dhabi, yang bekerja dalam bisnis tingkat tinggi dan dekat dengan tiga perusahaan yang terlibat,

---

<sup>62</sup> Haaretz, Haaretz Investigation: Secret Flight Operating Between Israel and Gulf State, Desember 2015, <https://www.haaretz.com/mystery-plane-plying-israel-gulf-route-1.5338820>, [Diakses 30 Mei 2021].

mengatakan AGT mendasarkan operasinya di Uni Emirat Arab dari kantor AIS di Sky Tower.<sup>63</sup>

Para pemimpin Israel dan Uni Emirat Arab belum mengomentari perdagangan langsung yang terjadi antara kedua negara, tetapi Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum penguasa Dubai dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab, mengatakan bahwa "Uni Emirat Arab akan bersedia berdagang dengan Israel jika mereka berdamai dengan orang Palestina, Kami akan melakukan segalanya dengan Israel kami akan berdagang dengan mereka dan kami akan menyambut mereka tetapi menandatangani proses perdamaian," katanya. Uni Emirat Arab dan Israel semakin dipandang berpotensi menjadi sekutu regional karena penentangan kedua negara terhadap Iran dan Hamas. Meskipun kedua negara tidak memiliki hubungan resmi, setidaknya secara publik, kemitraan bisnis AGT, AIS dan ATS telah berkembang dan sekarang mendominasi pasar keamanan dalam negeri Uni Emirat Arab. Dan kolaborasi antara ketiga perusahaannya tersebut di konfirmasi oleh kepala eksekutif AIS Khalfan al-Shamsi dalam sebuah pameran keamanan dalam negeri yang diadakan di Paris selama Juni 2012 memegang 80 persen pasar keamanan nasional Uni Emirat Arab.<sup>64</sup>

Dominasi pasar ini bertepatan dengan munculnya Musim Semi Arab dan sementara Uni Emirat Arab telah menghindari pergolakan domestik yang terlihat di tempat lainnya, pemberontakan tersebut telah menyebabkan pihak berwenang memperketat undang-undang yang mencakup aktivitas online dan memperluas

---

<sup>63</sup> Emirates, Security expo closes with mega contracts, Maret 2008, <https://www.emirates247.com/eb247/news/security-expo-closes-with-mega-contracts-2008-03-05-1.214771>, [Diakses 30 Mei 2021].

<sup>64</sup> Human Rights Watch, UAE: Cybercrimes Decree attack Free Speech, <https://www.hrw.org/news/2012/11/28/uae-cybercrimes-decree-attacks-free-speech>, November 2012, [Diakses 31 Mei 2021].

pengawasan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah proyek kunci untuk kemitraan bisnis tripartit AIS-ATS-AGT diumumkan dengan tiga kesepakatan senilai \$ 600 juta pada Februari 2011 untuk memasok lembaga penegak hukum lokal dengan solusi holistik lengkap yang mencakup berbagai jenis sensor yang diintegrasikan ke dalam satu sistem komando dan kontrol. Meskipun AGT tidak disebutkan dalam laporan yang mengumumkan kesepakatan tersebut, keterlibatan mereka dalam proyek yang dikenal sebagai "Falcon Eye" dikonfirmasi oleh profil LinkedIn dari David Weeks, mantan wakil presiden operasi di perusahaan Kochavi. Proyek Falcon Eye adalah inisiatif pengawasan seluruh emirat yang disetujui oleh Putra Mahkota Mohammed bin Zayed al-Nahyan, yang menurut New York Times, memiliki tentara bayaran rahasia swasta yang didirikan oleh Erik Prince, pendiri perusahaan keamanan swasta. Blackwater's.<sup>65</sup>

Beberapa detail proyek tersedia untuk umum, meskipun disebutkan secara singkat menggunakan nama "Kota Aman" diposting online oleh perusahaan keamanan yang diberi referensi oleh AIS dan ATS: "Proyek Kota Aman Abu Dhabi memungkinkan banyak badan pemerintah untuk memanfaatkan platform kota yang terpadu dan hemat biaya untuk fungsi kota yang penting termasuk pencegahan kejahatan, manajemen lalu lintas, dan kesiapsiagaan darurat.

Infrastruktur proyek terdiri dari sensor definisi tinggi yang didukung oleh pemroses dan analitik data canggih, alat intelijen dan investigasi terintegrasi, dan beberapa yang disesuaikan untuk berbagai penggunaan lembaga pemerintah.

---

<sup>65</sup> The New York Times, Secret Desert Force Set Up By Blackwater's Founders, Mei 2011, [https://www.nytimes.com/2011/05/15/world/middleeast/15prince.html?pagewanted=all&\\_r=0](https://www.nytimes.com/2011/05/15/world/middleeast/15prince.html?pagewanted=all&_r=0), [Diakses 31 Mei 2021].

Manajer program di AIS, Hassan al-Taffaq, menyatakan di profil LinkedIn-nya bahwa dia telah mengerjakan "proyek unik CCTB di seluruh kota di dunia " sejak 2010 dan tanggal pengirimannya adalah 22 Maret 2013. David Weeks, mantan wakil presiden operasi di AIS dan AGT yang bekerja antara Agustus 2006 dan Juli 2008, merujuk pada tahap awal Falcon Eye di bawah daftar tanggung jawab selama dia bekerja di perusahaan. Di profilnya disebutkan bahwa dia adalah "direktur proyek Uni Emirat Arab dari semua upaya kontrak yang terkait dengan proyek Pengawasan Kota Abu Dhabi" dan bertanggung jawab atas "integrasi lebih dari 500 sistem elektro-optik, kamera, sistem pengenalan pelat nomor, dan pusat komando". Keterlibatannya jelas pada tahap awal kesepakatan, saat ia keluar dari perusahaan pada tahun 2008, tetapi sejak itu AGT Kochavi terlibat dalam penelitian yang tampaknya berguna bagi Falcon Eye.<sup>66</sup>

AGT mencantumkan Institut Riset Jerman untuk Kecerdasan Buatan (DFKI) di antara mitranya, seperti halnya AIS di Abu Dhabi, dan perusahaan yang berbasis di Zurich mengatakan telah bekerja dengan DFKI untuk "meneliti penggunaan teknologi canggih untuk keselamatan resolusi tinggi, produk keamanan dan Big Data Artificial Intelligence." AGT mengambil hasil penelitian dari DFKI dan mitra akademis lainnya dan menerapkannya pada konteks bisnis pelanggan sasaran kami, demikian tertulis di situs webnya. "Salah satu proyek bersama kami menerapkan hasil penelitian analitik video untuk masalah pelacakan kendaraan otomatis; pekerjaan kami telah menghasilkan prototipe yang dapat digunakan. "

---

<sup>66</sup> MEE, Falcon Eye: The Israeli-installed mass civil surveillance system of Abu Dhabi, Juli 2015, <https://www.middleeasteye.net/news/falcon-eye-israeli-installed-mass-civil-surveillance-system-abu-dhabi>, [Diakses 31 Mei 2021].

Tidak diketahui apakah prototipe tersebut telah digunakan dalam pekerjaan AGT di Abu Dhabi tidak satu pun dari tiga perusahaan yang terlibat menanggapi permintaan komentar - tetapi pendekatan Kochavi untuk menggunakan analitik data besar dan Internet of Things adalah kunci pendekatan solusi keamanannya, menurut ke situs web perusahaannya. Keamanan Uni Emirat Arab telah menjadi sandera bagi orang Israel. Meskipun AGT Kochavi telah melakukan bisnis sebagai perusahaan swasta di Abu Dhabi, analis politik sebelumnya mengatakan kepada MEE bahwa perdagangan harus disetujui oleh kepemimpinan Israel dan Uni Emirat Arab.<sup>67</sup>

Hubungan tingkat tinggi dan bisnis harus dilakukan dengan restu dan partisipasi dari para aktor negara, tetapi, tentu saja, tidak ada yang mengakui ini," kata Yitzhak Gal, profesor ekonomi politik di Universitas Tel Aviv. Namu perlu diketahui bahwa Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan diketahui memiliki "hubungan pribadi yang baik" di masa lalu dengan mantan Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni, menurut kabel diplomatik yang bocor tahun 2009 dari Wikileaks.

Otoritas Israel telah mengizinkan perdagangan lewat bebas dengan UEA, meskipun penolakan mereka untuk mengizinkan pengiriman drone untuk dikirim ke Abu Dhabi pada tahun 2011 telah menyebabkan sengketa keuangan yang berlarut-larut antara AGT dan otoritas Emirat. Abu Dhabi telah membayar uang muka \$ 70 juta untuk drone, menurut laporan Intelijen Online 2012, tetapi departemen penjualan dan ekspor di kementerian pertahanan Israel memblokir

---

<sup>67</sup> Albawaba News, Advanced Integrated Systems (AIS) and the German Research Institute for the Artificial Intelligence (DFKI) will work together on integrated solutions, [Diakses 1 juni 2021].

kesepakatan itu. Sumber bisnis MEE yang berbasis di Abu Dhabi mengatakan pihak berwenang Israel melarang kesepakatan itu disampaikan karena itu akan menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional Israel jika "pengetahuan teknis yang sensitif dibocorkan ke pihak lain". Sumber tersebut mengatakan sengketa keuangan sedang berlangsung dan telah menyebabkan pemotongan staf di salah satu perusahaan Kochavi lainnya, yang telah memainkan peran kunci dalam menyediakan peralatan untuk pekerjaan AGT di Abu Dhabi.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> UPI.com, Emirates has security links with Israel, januari 2012, <https://www.upi.com/Defense-News/2012/01/27/Emirates-has-security-links-with-Israel/73471327687767/?ur3=1>, [Diakses 1 juni 2021].



### **BAB III**

## **UNI EMIRAT ARAB DALAM KONSTELASI POLITIK TIMUR TENGAH**

#### **A. Konflik Uni Emirat Arab-Iran**

Uni Emirat Arab telah menganggap Iran sebagai ancaman utama bagi keamanan kedaulatan negara nya serta sebagai ancaman terbesar bagi stabilitas kawasan terutama bagi negara-negara teluk. Pemerintah Uni Emirat Arab menganggap Iran sebagai ancaman dengan sejumlah alasan yakni pemerintahan Uni Emirat Arab memandang Iran memainkan peran dengan ambisinya untuk menjadi negara hegemon di kawasan timur tengah dengan berbagai kebijakan-kebijakan nya yang dianggap berbahaya bagi negara-negara teluk terutama Uni Emirat Arab yang secara geografis dekat dengan Iran.

Hubungan Uni Emirat Arab dengan Iran tidak memiliki hubungan yang baik karena memiliki perselisihan territorial yang cukup rumit dan berkepanjangan, sengketa wilayah teritorial anatar Uni Emirat Arab dan Iran terkait dengan klaim tiga pulau di selat Persia yakni pulau Abu Musa, Tunb, dan Lesser Tunb. Ketiga pulau tersebut memiliki posisi strategis di teluk Persia karena ketiga pulau tersebut menjadi jalur pelayaran utama di teluk Persia dan selat Hormuz.<sup>69</sup> Sengketa atas ketiga pulau tersebut dimulai pada tahun 1971 dimana dalam sebuah nota kesepahaman negara bagian emirat Sharjah setuju dengan kepemilikan wilayah dengan kehadiran militer iran dimalam penciptaan negara

---

<sup>69</sup> Karim Sadjadpour, *The Battle of Dubai: The United Arab Emirates and the U.S-Iran Cold War*, Cornegie Endowment for International Piece, Juli, 2011, hal, 10.

Federal Uni emirat Arab sehingga pada saat itu ketiga pulau tersebut dibawah kendali Teheran, <sup>70</sup>namun setelah Uni Emirat Arab berdiri dan Sharjah menjadi negara bagian dari Uni Emirat Arab membuat Abu Dhabi tidak pernah menerima perjanjian antara Sharjah dan Iran tersebut sebagai perjanjian yang sah sehingga perselisihan antara Uni Emirat Arab dan Iran pun terus berlangsung dengan serangkaian upaya mediasi yang gagal.<sup>71</sup>

Perseteruan antara Uni Emirat Arab dan Iran terus berlangsung hingga pada tahun 2010 menteri luar negeri Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed menyebut bahwa “kendali Iran terhadap pulau-pulau tersebut adalah tindakan yang memalukan dan menbandingkan situasi tersebut dengan pendudukan Israel atas wilayah Arab yang disita pada tahun 1967” meskipun pada saat itu menteri luar negeri Uni Emirat Arab tersebut menambahkan bahwa “saya tidak membandingkan Iran dengan Israel”. <sup>72</sup>Pihak Teheran pun menanggapi pernyataan Menteri luar negeri Uni Emirat Arab tersebut dengan menganggap bahwa ketiga pulau tersebut bagian yang sangat diperlukan dan tidak bisa dipisahkan dari wilayah nasionalnya dan menuduh Uni Emirat Arab beserta GCC terlalu ikut campur terhadap urusan internal Iran<sup>73</sup>, meskipun hubungan Uni Emirat Arab dan Iran tidak memiliki hubungan yang baik katas sengketa tersebut namun situasi ketegangan kedua

---

<sup>70</sup> Nima Adelhah, *Low Level Boundary Dispute Intensifies as Iran and the UAE Context Control of Strategic Gulf Islands*, The Jamestown foundations, Mei, 2012.

<sup>71</sup> Mohammed Abdullah Al Roken, *Dimensions of the UAE-Iran Dispute Over Three Islands*, in *United Arab Emirates: A New Perspective*, ed Ibrahim Abed and Peter Hellyer, London, 2001.

<sup>72</sup> Mahmoud Habboush, *Iran Occupation of Gulf Islands “Shameful Minister”*. Says Minister, *The National*, April, 2010, <https://www.thenationalnews.com/uae/iran-s-occupation-of-gulf-islands-shameful-says-minister-1.501529>, [Diakses 19 Juni 2021].

<sup>73</sup> Karim Sadjadpour, *Op cit.*

negara atas konflik sengketa tersebut tidak pernah sampai pada situasi yang buruk menjadi kekerasan dan konflik bersenjata.

Menanggapi perselisihan antara Uni Emirat Arab dan Iran membuat GCC dan Liga Arab turut ikut andil dengan membawa perselisihan sengketa tersebut harus diselesaikan dengan baik dan dibawa ke hadapan Mahkamah Internasional dan PBB namun dalam proses Arbitase tersebut Iran bersikeras bahwa pulau-pulau tersebut adalah bagian dari wilayah kedaulatannya dan Iran menindaklanjuti klaim tersebut Ketika pada tahun 2012 presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dengan mengunjungi salah satu pulau yang di sengketa<sup>74</sup> serta kunjungan panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran dan beberapa pejabat lainnya di pulau-pulau tersebut dengan tujuan mendirikan pangkalan Angkatan Laut serta membahas tentang membawa pariwisata di salah satu pulau tersebut.<sup>75</sup> Klaim Iran beserta aksinya dalam mengunjungi pulau-pulau yang disengketa membuat hubungan Uni Emirat Arab dan Iran kembali mengalami ketegangan hubungan bilateral yang serius dan menghambat rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik.

Kebijakan-kebijakan regional Iran telah menjadi perhatian serius dari negara teluk dan GCC dan terutama Uni Emirat Arab sebagai negara yang memiliki perselisihan serius dengan Iran dan pihak Uni Emirat Arab telah menyatakan keprihatinan yang sangat besar terhadap kebijakan-kebijakan yang di ambil Iran

---

<sup>74</sup> Thomas Erdbrink, A Tiny Island is Where Iran Makes a Stand, The New York Times, [https://www.nytimes.com/2012/05/01/world/middleeast/dispute-over-island-of-abu-musa-unites-iran.html?\\_r=0](https://www.nytimes.com/2012/05/01/world/middleeast/dispute-over-island-of-abu-musa-unites-iran.html?_r=0) April 2012. [Diakses 19 Juni 2021].

<sup>75</sup> Joanna Paraszczuk, Iran Inaugurates New Naval Base in Strait of Hormuz, The Jerusalem Post, November, 2012, <https://www.jpost.com/Iranian-Threat/News/Iran-inaugurates-new-naval-base-in-Strait-of-Hormuz>, [Diakses 19 Juni 2021].

yang semakin mendominasi kawasan dengan segala campur tangan Iran di berbagai konflik di timur tengah di antaranya konflik yang sedang terjadi di Yaman, Suriah, Irak, Lebanon, Bahrain dan beberapa tempat lainnya yang sering kali dalam konflik tersebut pihak Iran dan negara-negara Arab lainnya termasuk Uni Emirat Arab memiliki banyak pertentangan yang serius sehingga Uni Emirat Arab beserta negar-negara teluk lainnya terutama negara-negara yang bergabung dalam GCC telah menganggap Iran dengan segala kebijakan-kebijakannya sebagai ancaman serius.<sup>76</sup>

Kekuatan Militer Iran telah menjadi sebuah ancaman yang serius bagi Uni Emirat Arab beserta mitra kerjasamanya GCC sehingga Uni Emirat Arab beserta GCC telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi dan menekan pengaruh Iran di berbagai tempat konflik di kawasan timur tengah yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas kawasan. Kekhawatiran Uni Emirat Arab dan negara teluk lainnya pun makin meningkat dengan kemampuan rudal beserta pengembangan Nuklir yang sedang dilakukan Iran yang semakin meningkat sehingga pada perjanjian nuklir internasional dengan Iran dalam forum *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) yang diumumkan pada 14 juli 2015 membuat Uni Emirat Arab menyatak reservasi serius terhadap kesepakatan pengembangan nuklir Iran<sup>77</sup> namun dalam perundingan KTT CampDavid pada 14 mei 2015 antara Uni Emirat Arab beserta mitra GCC dengan presiden Obama berhasil membuat Amerika Serikat menegaskan komitmennya dalam mendukung stabilitas keamanan teluk

---

<sup>76</sup> Eddie Boxx, *Countering the Iranian Missile Threat in the Middle East*, Washington Institute for Near East Policy, Oktober, 2012, <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/countering-iranian-missile-threat-middle-east>, [Diakses 20 Juni 2021].

<sup>77</sup> U.S. Department of State, "*Joint Comprehensive Plan of Action*," July 14, 2015, <https://www.state.gov/>. [Diakses 20 Juni 2021].

serta menentang kebijakan-kebijakan regional Iran dan memberikan jaminan-jaminan lainnya.<sup>78</sup>

Pada pertemuan perdana menteri luar negeri Amerika Serikat dengan negara-negara GCC yang dilaksanakan di Qatar pada tanggal 3 Agustus 2015 Uni Emirat Arab beserta negara-negara anggota GCC lainnya sepakat dalam sebuah perjanjian kelompok untuk menekan perlu menjaga stabilitas keamanan dan stabilitas teluk dan kawasan dengan menekan Iran untuk mengubah perilaku serta kebijakan-kebijakannya di dalam kawasan regional dan berharap Iran mengubah kebijakan-kebijakan regionalnya dalam mewujudkan halaman baru terhadap stabilitas negara-negara teluk dan regional.<sup>79</sup>

## **B. Intervensi Uni Emirat Arab Terhadap Konflik Regional Timur Tengah**

### **1. Mesir**

Jatuhnya Presiden Mesir Hosni Mubarak yang tak terduga pada 11 Februari 2011 sangat mengejutkan bagi kepemimpinan Uni Emirat Arab. Negara-negara Teluk selalu menganggap diktator sekutu penting yang, seperti mereka, pro-Barat dalam kebijakan luar negeri dan otoritarian dalam kebijakan domestik. Untuk menjaga kontinuitas sebisa mungkin, UEA dan Arab Saudi secara sub-sekunder mendukung kepemimpinan militer Mesir, yang tetap tidak terpengaruh oleh tur politik-militer dan mencoba menjaga transisi

---

<sup>78</sup>The White House, “*U.S. – Gulf Cooperation Council Camp David Joint Statement*,” Mei, 2015, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/05/14/us-gulf-cooperation-council-camp-david-joint-statement>, [Diakses 21 Juni 2021].

<sup>79</sup> Qatar News Agency, “*Joint Statement of US-GCC Foreign Ministers’ Meeting*,” Agustus, 2015, <http://www.qna.org.qa/en-us/News/15080401100067/Joint-Statement-of-US-GCC-Foreign-Ministers-Meeting>, [Diakses 21 Juni 2021].

dari sistem Rak Muba ke struktur baru yang terkendali melalui Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (al-Majlis al-Majlis al-A'la li-l-Quwwat al-Musallaha). UEA menjanjikan bantuan senilai 3,3 miliar dolar Mesir pada musim semi 2011, meskipun tidak jelas berapa banyak yang sebenarnya dibayarkan.<sup>80</sup>

Arab Saudi juga menjanjikan dukungan pada tahap ini, tetapi cairo relation dengan Riyadh dan Abu Dhabi memburuk ketika Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilihan umum parliametary 2011-2012 yang diadakan dalam tiga putaran, dan kandidatnya Mohammed Morsi kemudian memenangkan pemilihan presiden Juni 2012. Kemungkinan UEA telah memberikan dukungan kepada kandidat yang dikalahkan, Ahmed Shafiq, perwakilan dari régime ancien. Salah satu indikasinya adalah Shafiq memindahkan kediamannya ke Emirates tak lama setelah pemilihan.<sup>81</sup>

Kemenangan pemilu Morsi juga menjadi kekalahan bagi UEA dan Arab Saudi. Di Abu Dhabi, kebangkitan Ikhwanul Muslimin di Mesir dipandang sebagai ancaman, karena Mohammed Bin Zayed khawatir pengaruhnya terhadap cabang Emirati-nya, al-Islah, yang telah berulang kali disebutkan sebagai kekuatan oposisi paling berbahaya di UEA. Oleh karena itu bukan kebetulan bahwa kepemimpinan Uni Emirat Arab mulai mengambil tindakan yang lebih kuat terhadap Saudara Muslim setempat tepat pada tahun 2012, kemudian menghancurkan mereka sepenuhnya seperti langkah ideologis apa

---

<sup>80</sup> Kristian Coates Ulrichsen, *Uni Emirat Arab: Kekuasaan, Politik, dan Pembuatan Kebijakan* (London dan New York, 2017), 63–65.

<sup>81</sup> Na'eem Jenaah, "Krisis Mesir: Dua Kudeta Kemudian, Militer Masih Memegang Kendali", dalam *Mempromosikan Kepemimpinan Pemikiran Afrika Progresif*, ed. Aziz Pahad, Garth le Pere dan Miranda Strydom (Pretoria: Institut Afrika Afrika Selatan, 2015), 41–53.

pun dapat dihancurkan..<sup>82</sup> Alarm di UEA meningkat ketika Qatar mengambil keuntungan dari hubungan buruk antara Abu Dhabi dan Kairo untuk datang membantu pemerintahan Egiptus yang baru. Pada 2012 dan 2013, emirat kecil itu menjadi donor asing utama Mesir.<sup>83</sup>

## 2. Libya

Pada awal intervensi UEA di Libya pada tahun 2011, dorongan anti-Islam hanya samar-samar terlihat. Di antara motif untuk campur tangan di negara Afrika Utara yang dilanda perang saudara, yang paling lazim pada awalnya mungkin adalah keinginan untuk membuktikan elfnya sekutu berharga AS dan NATO. Dari 2012 dan especially 2014, namun, tujuan UEA menjadi lebih jelas: Abu Dhabi ingin mencegah islamis mengambil kekuasaan di Tripoli dan mendukung otokrasi otoriter sebagai gantinya. UEA menemukan mitranya di Jenderal Khalifa Haftar, yang dari 2014 dan seterusnya mencoba untuk memperpanjang kendalinya dari Libya Timur ke seluruh negara.

Perang saudara Libya (pertama) pecah pada Februari 2011, setelah pasukan keamanan rezim Muammar al-Gaddafi dengan tegas berusaha memecah serangkaian unjuk rasa protes dengan angkatan bersenjata. Pada 17 Maret 2011, ketika pasukan Gaddafi berbaris menuju pemberontak yang kuat-

---

<sup>82</sup> Courtney Freer, "Ikhwanul Muslimin di Emirat: Anatomi Tindakan Keras", Mata Timur Tengah, 17 Desember 2015, <https://www.middleeasteye.net/big-story/muslim-brotherhood-emirates-anatomy-crackdown>, [ Diakses 24 Juni 2021].

<sup>83</sup> Imad K. Harb, "Penjelasan Ekonomi untuk Keberpihakan Mesir dalam Krisis GCC" (Washington, D.C.: Arab Center Washington DC, 9 Agustus 2017), [http://arabcenterdc.org/policy\\_analyses/an-economic-explanation-for-egypt-alignment-in-the-gcc-crisis/](http://arabcenterdc.org/policy_analyses/an-economic-explanation-for-egypt-alignment-in-the-gcc-crisis/). [ Diakses 24 Juni 2021].

memegang Benghazi, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1973, memungkinkan intervensi untuk melindungi populasi civilian. Pada hari-hari sebelumnya, UEA dan Qatar telah berperan dalam penyelenggaraan Dewan Kerjasama Teluk dan Liga Arab untuk menuntut pembentukan zona larangan terbang untuk militer Libya. Kegiatan diplomatik kedua Negara Teluk mempermudah AS dan sekutunya untuk melawan kesan bahwa intervensi berikutnya adalah perang yang dilancarkan oleh Barat terhadap negara Arab.<sup>84</sup>

Uni Emirat Arab dan Qatar juga mengambil bagian dalam pertempuran subse-quent melawan pasukan Gaddafi. UEA mengirim dua belas pesawat tempur; Qatar mengirim enam. Kedua negara juga mendukung pemberontak tertentu dengan uang dan weap-ons. UEA dengan cepat menemukan sekutu pilihannya dalam milisi Zintan. Kota di barat daya Tripoli, dengan populasi sekitar 50–60.000, dengan cepat mendapatkan penting karena unit-unit yang dikomandoi oleh militernya dewan menjadi aliansi milisi terkuat kedua di negara ini dengan dukungan Emirati ini.

Brigade Zintan termasuk dalam spektrum nasionalis politik Libya, dan telah menentang kelompok-kelompok Islam yang kuat dari tahap awal.<sup>85</sup> Tkekuatanterkuat Islamis adalah aliansi milisi Misrata, sebuah kota pelabuhan di timur Tripoli, yang menerima dukungan dari Qatar dari 2011

---

<sup>84</sup> Jean-Marc Rickli, "The Political Rationale and Implications of the United Arab Emirates' Military Involvement in Libya", dalam *Rasionale Politik dan Konsekuensi Internasional Perang di Libya*, ed. Dag Henriksen dan Ann Karin Larssen (Oxford, 2016), 134–54 (142).

<sup>85</sup> Dario Cristiani, *Milisi Zintan dan Negara Libya Terfragmentasi, Isu Panas* (Washington, D.C.: The Jamestown Foundation, 19 Januari 2012), unggahan [https://jamestown.org/wp-content//2012/01/Zintan\\_Brigade\\_Grey.pdf?x10484](https://jamestown.org/wp-content//2012/01/Zintan_Brigade_Grey.pdf?x10484). [Diakses 26 Juni 2021].



dan seterusnya, pada tahun-tahun berikutnya, konflik antara kelompok-kelompok bersenjata semakin mengambil karakter perang proksi UEA melawan Qatar.<sup>86</sup>

Milisi dari Zintan tidak terlalu kuat dalam jumlah, dengan hanya beberapa ribu pejuang. Tetapi mereka mendapat manfaat dari pengalaman mantan perwira rezim Gaddafi, yang, bersama dengan pelatih Emirati, yakin bahwa milisi Zintan dikenal karena organisasi yang baik dan kekuatan tempur mereka, yang tinggi oleh standar Libya. Persaingan dengan organisasi Islam menjadi lebih jelas dari Agustus 2011 dan seterusnya, ketika aliansi kelompok lutionary revodengan ideo- orientasi logis yang berbeda mengambil alih ibukota Tripoli dan tidak berhenti dari kekerasan di dalam metropolis bahkan setelah berakhirnya perang saudara pada Oktober 2011. Setelah itu milisi Zintan dikendalikan, di antara ingslainnya, bandara internasional di selatan Tripoli.<sup>87</sup>

Pemerintahan transisi yang lemah tahun 2011-2014 gagal membawa mili- tias yang menang di bawah kendali mereka, dengan hasil yang konflik antara nasionalis dan Islamis atas siapa yang memerintah di ibu kota semakin intensif. Pada musim panas 2014, bentrokan ini menyebabkan perang saudara kedua, ketika pertempuran pecah di Tripoli antara milisi musuh, dari mana aliansi yang dipimpin oleh kelompok-kelompok bersenjata dari Misrata, yang

---

<sup>86</sup> Wolfram Lacher, *Garis Patahan Revolusi. Aktor Politik, Kamp dan Konflik di Libya Baru*, Makalah Penelitian SWP 4/2013 (Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Mei 2013), 19, <https://www.swp-berlin.org/en/publication/libya-fault-garis-of-the-revolusi>. [Diakses 26 Juni 2021].

<sup>87</sup> Frederic Wehrey, *The Burning Shores: Inside the Battle for the New Libya* (New York, 2018), 93–94.

disebut Dawn of Libya (Fajar Libiya), muncul sebagai pemenang. Pada bulan Agustus, milisi Fajar mengambil bandara antar-nasional ibukota, mengusir pasukan proxy Uni Emirat Arab.<sup>88</sup>

Tahun 2014 adalah titik balik di Libya dan dalam kebijakan Uni Emirat Arab terhadap negara itu. Abu Dhabi sekarang mencari pasangan baru. Salah satu motivasi penting adalah kebangkitan milisi Islamis, yang mendapatkan tanah tidak hanya di ibukota Tripoli. Di timur negara itu juga, kelompok-kelompok Islam dari berbagai orientasi telah tumbuh lebih kuat dan lebih kuat sejak 2012. Mereka mampu memperluas pengaruh mereka di Benghazi dan membawa sebagian besar kota di bawah kendali mereka. Pada Juli 2014, ada indikasi publik pertama dari kehadiran IS di kubu Jihadis Libya Timur.

Pemicu penting bagi kebijakan UEA yang sekarang lebih aktif adalah insiden pada bulan yang sama, di mana 21 penjaga perbatasan Mesir tewas di dekat perbatasan Liby selama serangan oleh kelompok bersenjata. Mesir menyalahkan "teroris" atas serangan itu, dan Kairo mulai memperdebatkan intervensi militer di negara yang bersaha-bouring itu. Kepemimpinan UEA juga khawatir bahwa perang saudara di Libya dapat mempengaruhi stabilitas Mesir. Pada awal Agustus, pesawat tempur Emirati menerbangkan dua gelombang serangan terhadap milisi Misrata di Tripoli dari sebuah

---

<sup>88</sup> Chris Stephen dan Anne Penketh, "Ibu Kota Libya di bawah Kendali Islam setelah Bandara Tripoli Disita", *The Guardian*, 24 Agustus 2014.

pangkalan di Mesir, tetapi tidak dapat mencegah koalisi Fajar mengambil alih ibu kota.<sup>89</sup>

### 3. Suriah

Selama 2014-2015, Uni Emirat Arab bergabung sebagai anggota koalisi pimpinan AS mengintervensi Suriah, UEA mengirim pilot untuk melakukan dan bahkan memerintahkan beberapa serangan udara koalisi terhadap oposisi di Suriah. UEA juga menjadi tuan rumah bagi pasukan lain yang berpartisipasi dalam upaya negara anti-Islam, termasuk jet Prancis yang ditempatkan di Pangkalan Udara Al Dhafra dan 600 pasukan dari Australia.<sup>90</sup> Di Suriah, negara-negara GCC mencari Presiden Bashar Al Asad yang terguling ketika pemberontakan terhadap pemerintahannya dimulai pada 2011. UEA tidak menyediakan persenjataan kepada kelompok tertentu, tetapi sebaliknya berkontribusi pada kumpulan dana multilateral untuk membeli senjata for kelompok pemberontak yang disetujui di Suriah. Ketika presiden Bashar al-Asad sebagian besar telah menang dalam konflik setelah intervensi militer Rusia atas namanya pada tahun 2015, dan UEA membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus pada Desember 2018, mengklaim bahwa hal itu akan membantu melawan Iran yang sedangfluence di Suriah<sup>91</sup>.

---

<sup>89</sup> David D. Kirkpatrick dan Eric Schmitt, "Arab Nations Strike in Libya, Surprising U.S.", *The New York Times*, 25 Agustus 2014, <http://www.nytimes.com/2014/08/26/world/africa/egypt-and-united-arab-emirates-said-to-have-have-secretly-dilakukan-libya-airstrikes.html>. [Diakses 26 Juni 2021].

<sup>90</sup> BBC News, "Krisis Negara Islam: Australia akan Mengirim 600 Pasukan ke UEA," 14 September 2014. [Diakses 27 Juni 2021].

<sup>91</sup> Reuters, "UEA membuka kembali kedutaan Suriah dalam dorongan untuk Assad.", 27 Desember 2018. [Diakses 27 Juni 2021].

Pada Maret 2020, Syaikh Mohammad bin Zayid menawarkan bantuan Assad untuk membantu Suriah mengatasi wabah COVID-19; pengiriman makanan dan pasokan medis, termasuk vaksin COVID-19, dikirim ke Suriah pada awal April 2021.<sup>92</sup> Uni Emirat Arab juga telah berusaha untuk meringankan penderitaan dari krisis Suriah melalui sumbangan kepada pengungsi Suriah dan hibah kepada Yordania untuk membantunya mengatasi pengungsi Suriah yang telah melarikan diri ke sana. Pada tahun 2018, UEA, Arab Saudi, dan Kuwait menyediakan total \$ 2.5 billion untuk membantu menstabilkan Keuangan Jordan.<sup>93</sup>

#### **4. Yaman**

Uni Emirat Arab dalam kemitraan erat dengan Arab Saudi, mengintervensi milisi di Yaman pada Maret 2015 dengan personel militer, baju besi, dan serangan udara terhadap faksi Zaydi Syiah "Houthi" yang telah mengusir pemerintah di Sanaa. Koalisi pimpinan Saudi menegaskan bahwa intervensi itu diperlukan untuk menggulirkan kembali regional dalam membendung Iran, yang telah memasok Houthis dengan senjata, termasuk rudal balistik dan jelajah jarak pendek yang ditembakkan Houthis ke UEA dan Arab Saudi dan di Uni Emirat Arab dan kapal-kapal lain di Selat Bab el Mandeb. Hampir 150 tentara Uni Emirat Arab tewas dalam konflik Yaman. Uni Emirat Arab telah menyoroti pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Yaman, tetapi kritik internasional bahwa upaya koalisi pimpinan Saudi

---

<sup>92</sup> The Washington Post, "Assad Suriah, putra mahkota Abu Dhabi berbicara di telepon: Media negara." Straits Times, 28 Maret 2020; Bassem Mroue, "UEA mengirim bantuan Suriah untuk membantunya melawan penyebaran virus corona," 8 April 2021. [Diakses 27 Juni 2021].

<sup>93</sup> Forbes Timur Tengah "UEA Memperluas Paket Bantuan Ekonomi AED 3 Miliar Ke Yordania.", 9 Oktober 2018. [Diakses 27 Juni 2021].

menyebabkan korban sipil dan masalah kemanusiaan mungkin telah berkontribusi pada eksisi Uni Emirat Arab pada Juli 2019 untuk menarik sebagian besar pasukan daratnya dari Yaman. Pasukan Uni Emirat Arab terus mendukung faksi di Yaman selatan yang menentang pemerintah Republik Yaman.<sup>94</sup>

Uni Emirat Arab juga terus bekerja sama dengan pasukan AS dan dengan komunitas lokal Yaman untuk melawan faksi lokal Al Qaeda—Al Qaeda di Semenanjung Arab (AQAP).<sup>95</sup> Pada Agustus 2017, pasukan Uni Emirat Arab dan AS dilaporkan menyarankan sekitar 2.000 pasukan pemerintah Yaman yang melakukan operasi terhadap tempat-tempat suci AQAP di Provinsi Shabwa.<sup>96</sup> Pada Maret 2019, UEA-AS operasi menyelamatkan seorang sandera Amerika di Yaman yang ditahan oleh orang-orang yang terikat dengan Al Qaeda.<sup>97</sup>

### **C. Uni Emirat Arab Terhadap Konflik Arab-Israel**

Uni Emirat Arab telah bergabung dengan negara-negara GCC lainnya dalam mendukung Konferensi Madrid 1991 untuk menyelesaikan sengketa Arab-Israel melalui negosiasi langsung dari berbagai pihak. Selain dukungan politiknya, Uni Emirat Arab telah memberikan beberapa bantuan keuangan kepada Palestina, dan

---

<sup>94</sup> Ibrahim Jalal, "UEA mungkin telah menarik diri dari Yaman, tetapi pengaruhnya tetap kuat," Institut Timur Tengah, 25 Februari 2020.

<sup>95</sup> The Washington Post, "Pasukan AS untuk Tinggal Lebih Lama di Yaman untuk Melawan al Qaeda.", 18 Juni 2016. [Diakses 27 Juni 2021].

<sup>96</sup> New York Times "Pasukan Yaman Menargetkan Kubu Qaeda.", 7 Agustus 2017. [Diakses 27 Juni 2021].

<sup>97</sup> New York Times, "Operasi yang Dipimpin oleh U.A.E. Membebaskan Sandera Amerika di Yaman.", 7 Maret 2019. [Diakses 27 Juni 2021].

telah memutuskan, bersama dengan anggota GCC lainnya, untuk menghilangkan boikot sekunder dan tersier terhadap Israel untuk memfasilitasi proses perdamaian. Uni Emirat Arab ingin proses perdamaian berhasil, tetapi agak berhati-hati dan selektif dalam mendukungnya.

Bersama dengan sebagian besar negara-negara Arab, termasuk GCC, mereka menolaknya menghilangkan boikot utama terhadap Israel. Ia juga menolak menjadi tuan rumah multilateral konferensi proses perdamaian yang mencakup Israel, dan belum setuju untuk bergabung dengan Timur Tengah bank pembangunan, dipromosikan oleh Amerika Serikat sebagai pelengkap ekonomi politik negosiasi. Dukungan keuangannya, juga, sebagian besar, telah diberikan dengan hati-hati ketentuan yang memastikan akuntabilitas penggunaannya.<sup>98</sup> Ada beberapa alasan untuk pendekatan hati-hati ini.

Di satu sisi, Uni Emirat Arab pemerintah ingin melihat konflik Arab-Israel diakhiri dengan cara yang memuaskan partai-partai Arab, dan mengakui bahwa upaya saat ini mungkin dapat melakukannya. Di samping itu, konflik berkepanjangan ini begitu rumit dan emosi yang mengelilinginya begitu dalam pemerintah tidak yakin upaya saat ini akan berhasil. Penundaan dalam proses perdamaian memiliki menimbulkan keraguan di dunia Arab secara umum tentang prospek untuk mengakhiri perselisihan secara dini, dan Uni Emirat Arab tidak yakin akan berhasil. Pada musim semi 1995, AS memberikan veto di Dewan Keamanan PBB terhadap resolusi yang didukung Arab mengutuk Israel atas

---

<sup>98</sup> MFA.gov.il. *GUIDE TO THE MIDEAST PEACE PROCESS*, 22 Agustus 2000, <https://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/guide%20to%20the%20mideast%20peace%20process.aspx>, [ Diakses 28 Juni 2021].

perampasan tanah di Yerusalem, dan ketika anggota terkemuka Senat AS mendesak untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem.

Bertentangan dengan keinginan Arab, Uni Emirat Arab pejabat menjadi prihatin bahwa ini berarti kembalinya apa yang mereka anggap sebagai anti-Arab bias dalam kebijakan AS, dan ini meningkatkan kewaspadaan mereka dalam mendukung proses perdamaian. Selain itu, kebencian mendalam Uni Emirat Arab atas posisi yang diambil oleh Pembebasan Palestina Dukungan Ketua Organisasi (PLO) Yasir Arafat untuk Saddam Husain telah membuat Uni Emirat Arab enggan memberikan dana besar kepada Arafat untuk membangun Palestina Nasional Otoritas (PNA).

Karena Uuni Emirat Arab bukanlah pihak langsung dalam konflik, dan dua pihak langsung peserta-Lebanon dan Suriah-belum mencapai kesepakatan dasar apa pun dengan Israel, Uni Emirat Arab tidak ingin keluar mendahului mereka dalam mendukung upaya perdamaian saat ini. Apalagi, pemerintah Uni Emirat Arab tidak sepenuhnya mempercayai Arafat, tokoh kunci di Pihak Palestina dalam prosesnya. Uni Emirat Arab belum memaafkan Arafat karena mendukung Saddam Husain selama, dan bahkan setelah, krisis Teluk 1990-91.

Arafat sering singgah di Abu Dhabi dan bertemu dengan Syekh Zayid sebelum krisis, tetapi belum secara resmi mengunjungi Uni Emirat Arab dalam lima tahun terakhir. Selanjutnya, kebiasaan Arafat berkembang sebagai pemimpin revolusioner mengendalikan dan mencairkan dana PLO sendiri, tanpa pertanggungjawaban yang substansial siapa pun, telah membuat Uni Emirat Arab enggan memberikan PLO bantuan keuangan langsung, lebih memilih untuk

menyalurkan dana melalui Bank Dunia atau organisasi independen lainnya memastikan bahwa mereka menjangkau rakyat Palestina.<sup>99</sup>

Sementara pemerintah Uni Emirat Arab mengakui pentingnya penyelesaian yang berhasil dalam sengketa Arab-Israel, ia melihat masalah ini sebagian besar melalui optiknya sendiri kepentingan nasional di kawasan Teluk Persia. Pandangan Uni Emirat Arab tentang Arafat sangat kuat dipengaruhi oleh perilaku Arafat yang tidak dapat diterima dalam krisis Teluk. Keengganan Uni Emirat Arab untuk keluar dari Suriah dalam penyelesaian damai sebagian karena keinginan Uni Emirat Arab untuk mempertahankannya.

Dukungan Suriah untuk Uni Emirat Arab dalam masalah Teluk: Hubungan baik Suriah dengan Iran penting ke Uni Emirat Arab, yang ingin menahan ambisi hegemonik Iran di wilayah tersebut, dan Suriah telah menjadi pemain kunci dalam koalisi melawan Saddam Husain. Akhirnya, Uni Emirat Arab kekurangan minat pada bank pembangunan Timur Tengah yang baru sebagian mencerminkan kecurigaan umumnya akan hal itu ini hanyalah satu skema lagi yang dibuat oleh negara-negara miskin di kawasan ini untuk mendapatkan mereka tangan atas sumber daya keuangan negara-negara Teluk yang kaya seperti Uni Emirat Arab.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> The New York Times, *Palestinian Says His Delegation Will Assert PLO Ties at Talks*, 22 Oktober 1991. [Diakses 28 Juni 2021].

<sup>100</sup> MFA. *The Madrid Framework*, 28 Januari 1999.



**BAB IV**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI  
PERUBAHAN POLITIK LUAR NEGERI UNI EMIRAT ARAB  
TERHADAP PEMBUKAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK  
DENGAN ISRAEL**

**A. Faktor Politik dan Keamanan**

Uni Emirat Arab dan Israel memiliki kepentingan politik yang sama dalam menjaga stabilitas politik di timur tengah dimana Uni Emirat Arab dan Israel sama-sama ingin menmbendung dominasi Iran yang dianggap sebagai ancaman terbesar bagi kedua negara. Perlu diketahui bahwa Iran dianggap sebagai negara dengan kekuatan militer yang disegani di kawasan timur tengah serta negara yang memiliki faham yang berbeda dari negara-negara arab lainnya faham yang berbeda ini berdasarkan perbedaan dalam aliran keagamaan yang dimana Iran adalah negara yang menganut Syiah dan negara Arab lainnya yang beraliran Sunni.

Fokus utama dari kepentingan politik Uni Emirat Arab dan Israel adalah untuk membendung kekuatan atau pengaruh Iran di kawasan timur tengah hal ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan Iran dianggap berani dan bertentangan dengan negara-negara Arab lainnya terutama negara-negara Teluk Arab seperti Uni Emirat Arab yang memiliki beberapa konflik dengan Iran sehingga Uni Emirat Arab perlu untuk mencegah dominasi Iran di kawasan timur tengah untuk menjamin keamanan nasionalnya.

Israel juga memiliki pandangan sama dengan Uni Emirat Arab dalam mencegah dominasi Iran di kawasan timur tengah karena selama ini Israel menganggap Iran sebagai musuh eksistensial walaupun sebelumnya Iran pada saat rezim Mohammad Reza Pahlevi hubungan Iran dan Israel sangat erat bahkan Iran menjadi tempat komunitas yahudi terbesar di kawasan timur tengah, namun setelah revolusi Islam pada tahun 1979 setelah raja Mohammad Reza Pahlevi di gulingkan dan Iran berubah menjadi Republik Islam Israel tidak mengakui Republik Islam Iran yang baru berdiri tersebut sehingga hal ini membuat hubungan baik sebelumnya antara Iran dan Israel berangsur pudar. Hubungan Iran dan Israel setelah revolusi Islam Iran semakin memanas dimana pemimpin tertinggi Iran saat itu Ayatollah Ali Khamenei menyebut bahwa Israel adalah penjajah atas Yerusalem dan bertanggung jawab atas Genosida terhadap masyarakat Palestina serta Ayatollah juga menyebut bahwa Israel adalah tumor kanker yang akan di potong dari kawasan timur tengah.<sup>101</sup>

Dominasi Iran di timur tengah semakin membesar setelah pendirian Hizbullah di Lebanon pada tahun 1982 dimana pendiri kelompok Hizbullah adalah seorang ulama Syiah Iran yang bernama Ali Akbar Mohtashamipour<sup>102</sup>. Kelompok militan Hizbullah ini merupakan kelompok politik dan militer yang kuat di Lebanon dan kelompok Hizbullah ini didukung serta di danai oleh Iran dan membuat kelompok Hizbullah menjadi salah satu kelompok yang sangat di

---

<sup>101</sup> Kompas.com. Sejarah Hubungan Iran-Israel: dari Bersekutu hingga Jadi Lawan Mematikan, April 2021, <https://internasional.kompas.com/read/2021/04/16/121149270/sejarah-hubungan-iran-israel-dari-bersekutu-hingga-jadi-lawan?page=all>, [Diakses 6 Juli 2021].

<sup>102</sup> CNN Indonesia, Ulama Syiah Iran Pendiri Hizbullah Meninggal karena Covid, Juni 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210608142844-120-651732/ulama-syiah-iran-pendiri-hizbullah-meninggal-karena-covid>, [Diakses 8 Juni 2021].

waspadai di kawasan timur tengah, kekuatan militer yang dimiliki Hizbullah menurut Israel sangat mengkhawatirkan dimana Israel meyakini bahwa kelompok Hizbullah ini memiliki 150.000 roket dan mudah dengan jangkauan serangannya dapat mencapai beberapa wilayah Israel. Konfrontasi antara Israel dan Hizbullah telah beberapa kali terjadi sehingga membuat Israel merasa harus menghentikan kelompok tersebut demi menjaga stabilitas wilayahnya namun menghentikan Hizbullah tidak dapat dilakukan dengan cara-cara biasa hal ini dikarenakan dukungan dari kelompok tersebut membuat dapat bertahan sampai sekarang jadi jika mau menghentikan pergerakan kelompok hizbullah maka Israel harus menghentikan dominasi Iran di kawasan timur tengah.<sup>103</sup>

Uni Emirat Arab dan Israel yang memiliki kepentingan Bersama dalam membendung kekuatan Iran telah beberapa kali melakukan lobby politik Bersama dan pertemuan diam-diam walaupun pertemuan tersebut tidak di publish ke publik namun beberapa media dan pengamat politik internasional telah membicarakan pertemuan tersebut, pertemuan pihak Uni Emirat Arab dan pihak Israel dalam membendung dominasi Iran terlihat pada tahun 2012 dimana pada saat itu perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di PBB yang isi pidatonya memberikan “ Garis Merah” terhadap pengembangan nuklir Iran dan berharap dunia internasional memberikan tekanan terhadap Iran untuk menghentikan program nuklirnya tersebut dan disisi lain negara-negara teluk terutama Uni Emirat Arab memberikan respon yang baik terhadap pidato.

Benjamin Netanyahu tersebut karena Uni Emirat menganggap bahwa program nuklir Iran dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga setelah Pidato

---

<sup>103</sup> CNN Indonesia, Perang dengan Hizbullah, Israel Bisa Diserang 2.000 Roket, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210317111112-120-618515/perang-dengan-hizbullah-israel-bisa-diserang-2000-roket>. [Diakses 8 Juni 2021].

Benjamin Netanyahu tersebut dikabarkan bahwa pihak Israel yang diwakili perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Pihak Uni Emirat Arab yang diwakili Menteri luar negerinya Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan melakukan pertemuan diam-diam di salah satu hotel di New York.<sup>104</sup>

Kolaborasi Uni Emirat Arab dan Israel dalam panggung politik dalam upaya membedung kekuatan Iran tersebut telah mendorong kedua negara dalam hubungan diam-diam yang dimana walaupun kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik yang secara resmi namun tidak menghentikan keduanya dalam kerjasama politik untuk mencapai tujuan politik masing-masing negara, hubungan diam-diam kedua negara tanpa hubungan diplomatik ini yang kadang kala menjadi problem kedua negara sehingga Uni Emirat Arab dan Israel merasa perlu melakukan normalisasi hubungan agar kerjasama kedua negara kedepannya dapat berjalan dengan baik.

Meskipun hubungan Iran dengan Uni Emirat Arab kurang bermusuhan daripada dengan Israel, meningkatnya ancaman tetangga Uni Emirat Arab di seluruh Teluk cukup besar untuk menjamin langkah strategis seperti itu dengan Israel. Bagaimanapun, sebagian besar strategi Uni Emirat Arab dan doctrine berasal dari kepentingan keamanan GCC, yang, sejak didirikan pada tahun 1981, telah bekerja untuk menyeimbangkan rezim Iran yang berperang.<sup>105</sup>

Saat ini, Uni Emirat Arab dan Iran terus bersaing untuk hegemoni dan kekuasaan di wilayah tersebut, dan ketegangan ini telah ditambah oleh kolaborasi

---

<sup>104</sup> Haaretz.com, "Exclusive: Netanyahu Secretly Met With UAE Foreign Minister in 2012 in New York," (25 July 2017), <https://www.haaretz.com/israel-news/netanyahu-secretly-met-with-uae-foreign-minister-in-2012-in-new-york-1.5432342>, [Diakses 8 Juni 2021].

<sup>105</sup> Hijab Shah dan Melissa Dalton, "Kerja Sama Militer dan Keamanan Asing UEA yang Berkembang: Jalan Menuju Profesionalisme Militer," Carnegie Middle East Center, 12 Januari 2021.

militer Emirati dengan Arab Saudi, terutama selama konflik di Yaman.<sup>106</sup> Lebih lanjut, perselisihan teritorial selama beberapa dekade antara Uni Emirat Arab dan Iran atas Abu Masa, Tunb Besar, dan Tunb Kecil tetap menjadi sumber gesekan yang signifikan antara kedua negara, karena kontrol pulau-pulau ini menegaskan kontrol strategis lalu lintas maritim di Teluk, dengan sekitar empat puluh persen dari produksi minyak global melewati thkasar Selat Hormuz setiap hari.<sup>107</sup>

Namun, Iran adalah ancaman keamanan langsung dengan seluruh gudang rudal balistik dan jelajahnya dalam jangkauan yang mencolok dari Uni Emirat Arab dan aset strategisnya, serta perannya sebagai proliferasi aktif dan pemasok untuk kelompok proksi di wilayah tersebut.<sup>108</sup> Dan meskipun Uni Emirat Arab menjadi negara Arab pertama yang membuka pembangkit listrik tenaga nuklir pada Agustus 2020, Uni Emirat Arab tetap waspada terhadap kegiatan proliferasi nuklir Iran, terutama dengan meningkatnya pembangkangan Iran terhadap kisi-kisi Disinte2015 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).<sup>109</sup>

Israel, di sisi lain, menghadapi musuh yang jauh lebih antagonis dan kurang baik dengan Iran. Hebatnya, Iran awalnya berbagi hubungan strategis dan ramah dengan Israel dan menjadi negara Muslim kedua yang mengakui Israel pada tahun 1950.<sup>110</sup> Namun, hubungan ini dengan cepat memburuk dengan Revolusi Iran 1979 dan pemasangan rezim asokratis baru yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini, yang segera memeluk penyebab Palestina, denounced Israel

---

<sup>106</sup> Danny Citrinowicz, "Israel and the UAE on Iran: Shared Foe, Different Perspectives," The Washington Institute, 1 September 2020.

<sup>107</sup> Raúl Redondo, "Iran Warns UAE over Disputed Islands near Strait of Hormuz," Atalayar, 6 Oktober 2020.

<sup>108</sup> Missile Threat, "Missiles of Iran," Missile Threat: CSIS Missile Defense Project (Center for Strategic and International Studies), 7 Maret 2021.

<sup>109</sup> Vivian Yee, "U.A.E. Becomes First Arab Nation to Open a Nuclear Power Plant," The New York Times, 1 Agustus 2020.

<sup>110</sup> Marc Daou, "Iran and Israel: A History of the World's Best Enmity," France 24, 11 Mei 2018.

sebagai "Setan Kecil," dan memutuskan hubungan dengan Israel tiga minggu kemudian.<sup>111</sup> Meskipun ada contoh kerja sama selama Perang Iran-Irak pada 1980-an, Iran tetap berkomitmen untuk penghancuran Israel, mengacungkan merek pada tahun 2019 "kapasitas mereka untuk menghancurkan rezim Zionis penipu" dan bahwa upaya ini sekarang menjadi "tujuan yang dapat dicapai."<sup>112</sup> Dalam kata-kata analis Ali Vaez, konflik Iran-Israel telah menjadi "sekrup yang hanya berbalik dalam satu arah, menjadi lebih tegang dan tegang dari waktu ke waktu," dan pada 2019 kedua negara have membuat pernyataan eksplisit tentang kemampuan pertahanan dan kesiapsiagaan militer mereka dengan kemungkinan konflik langsung.<sup>113</sup>

Secara khusus, JCPOA tetap menjadi sumber ketegangan yang dominan antara Israel dan Iran, terutama dengan upaya baru-baru ini by Iran untuk memperluas program nuklirnya. Sementara Israel lebih memilih pendekatan konfrontatif tekanan politik, sanksi ekonomi, dan penggunaan kekuatan untuk mengatasi proliferasi Iran, Uni Emirat Arab memilih tekanan dan diplomasi terbatas untuk mengelola threat kritis ini.<sup>114</sup>

Sementara itu, kepentingan keamanan Israel dan Uni Emirat Arab juga tumpang tindih dalam hal berisi entrenchment Iran dan melawan kelompok-kelompok proksi Iran di wilayah tersebut. Selama lima tahun terakhir, Iran telah mempertahankan 'keseimbangan kekuatan yang efektif' kemampuanyang paling mudah diterapkan dengan keuntungan terbesar dalam konflik actual karena

---

<sup>111</sup> Garrett Nada, "Iran's Confrontation with Israel over Four Decades," The Iran Primer, 21 Januari 2020.

<sup>112</sup> "Iran Guards Chief: Destroying Israel Now Not a Dream but an 'Achievable Goal,'" The Times of Israel, 30 September 2019.

<sup>113</sup> Tom Allinson, "Israel-Iran Conflict to Be Major Middle East Issue in 2020," Deutsche Welle, 2 Januari 2020.

<sup>114</sup> Danny Citrinowicz, "Israel and the UAE on Iran: Shared Foe, Different Perspectives," The Washington Institute, 1 September 2020.

kapasitas uniknya untuk bertarung melalui pihak ketiga di kawasan tersebut.<sup>115</sup> Sepanjang empat dekade terakhir, Iran telah mendukung mitra dan proksinya dalam semua konflik militer utama Israel, memasok personel, materiel, dan uang ke tiga perbatasan Israel-Lebanon, Suriah, dan wilayah Palestina.<sup>116</sup> Tidak hanya Iran secara langsung mengembangkan Hizbullah sebagai kelompok militan anti-Israel, pro-Iran pada 1980 yang memiliki since tetap menjadi ancaman konstan bagi Israel, tetapi Iran juga mendukung Hamas di Gaza dan Houthis di Yaman yang semuanya dikutuk atau diperjuangkan secara aktif oleh Uni Emirat Arab.<sup>117</sup>

Upaya sentral Uni Emirat Arab untuk melawan ekstremisme Ikhwanul Muslimin, Al Qaeda, dan ISIS juga sejalan dengan kepentingan strategis Israel, yang tetap menjadi musuh kelompok-kelompok teroris ini.<sup>118</sup> Sumber penting lain dari kekhawatiran keamanan bersama adalah Turki, yang dengan kebijakan yang semakin revisi dan ekspansionis di seluruh wilayah melanjutkan untuk mengejar langkah-langkah agresif dan koersif terhadap Uni Emirat Arab dan Israel.<sup>119</sup>

Beberapa peristiwa penting menjelang Abraham Accords pada Agustus 2020 memperburuk ketegangan regional, sehingga memberikan dorongan yang lebih kuat untuk keselarasan strategis Israel dan Uni Emirat Arab, serta pembentukan poros melawan Iran di wilayah tersebut. Bahkan, tahun 2020 dimulai dengan pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani komandan militer paling

---

<sup>115</sup> John Raine, "Iran, Its Partners, and the Balance of Effective Force," War on the Rocks, 18 Maret 2020.

<sup>116</sup> Garrett Nada, "Iran's Confrontation with Israel over Four Decades," The Iran Primer, 21 Januari 2020.

<sup>117</sup> *Opcit*; John Raine, "Iran, Its Partners, and the Balance of Effective Force," War on the Rocks, 18 Maret 2020.

<sup>118</sup> Hijab Shah and Melissa Dalton, "Evolving UAE Military and Foreign Security Cooperation: Path Toward Military Professionalism," Carnegie Middle East Center, 12 Januari 2021.

<sup>119</sup> Ebtesam al-Ketbi, "Emirati-Israeli Peace Agreement: Could It Be a Game-Changer?" Emirates Policy Center, September 24, 2020; Henri J. Barkey, "The UAE-Israel Agreement Isn't Only About Iran. There's Also Turkey.," Council on Foreign Relations (Council on Foreign Relations), 21 September 2020.

kuat yang memimpin Pasukan Quds Iran yang dilakukan oleh tanggul udara AS dandidukung dengan intelijen Israel yangberharga, pengetahuan publik yang mendorong ancaman menargetkan Tel Aviv dan Haifa untuk membalas kematian Soleimani.<sup>120</sup> Friction terus meningkat ketika Iran mempertahankan perluasan upaya proliferasi nuklirnya sepanjang tahun, meluncurkan satelit militer pertamanya pada 22 April.

Kolaborasi AS-Israel lainnya dalam pembunuhan 'Nomor 2' Al-Qaeda Abu Mohammed al-Masri di Iran pada 7 Agustus hanya enam hari sebelum Abraham Accords diumumkan mencontohkan meningkatnya ketegangan di kawasan serta momentum kamp anti-Iran yang meningkat untuk mengambil tindakan substansial terhadap Iran dan proksinya. Kebijakan luar negeri "tekanan maksimum" AS menentang Iran sepanjang 2020 sebagian besar memperburuk permusuhan regional ini, banyak karena kampanye sanksi pemerintahan Trump yang luas yang diberlakukan pada industri Iran, militer, pemasok senjata, perusahaan, outlet media, dan pejabat tinggi.<sup>121</sup>

Pengamat Tova Norlen dan Tamir Sinai menekankan, "Dukungan Iran yang berkelanjutan untuk proksi regional, kelompok radikal, dan terorisme, dan kembalinya ke kegiatan nuklir setelah AS menarik diri dari perjanjian, mungkin menjadi faktor paling kuat yang menyatukan teman-teman baru."<sup>122</sup> Tidak hanya kerja sama keamanan ini memungkinkan kolaborasi yang berlebihan dalam teknologi militer dan intelijen yang berharga, tetapi perjanjian ini juga

---

<sup>120</sup> Seth J. Frantzman, "Al-Qaeda's Threat to Jews Spurred Operation to Kill Top Leader - Report," The Jerusalem Post, 16 November 2020.

<sup>121</sup> Matthew Lee and James LaPorta, "US, Israel Worked Together to Track and Kill Al-Qaida No. 2," AP NEWS (Associated Press, November 15, 2020).

<sup>122</sup> Tamir Sinai and Tova Norlen, "The Abraham Accords – Paradigm Shift or Realpolitik?" (George C. Marshall European Center For Security Studies), Oktober 2020.



memfasilitasi pergeseran konsekuensial dalam keseimbangan kekuasaan regional dengan memperkuat aksi anti-Irans. Lagi, Accords bukan aliansi resmi dengan komitmen militer yang eksplisit. Namun, kemitraan ini secara efektif meningkatkan kehadiran Israel dan kemampuan militer di sekitar Iran, dan Presiden Pusat Kebijakan Emirates telah pergi sejauh ini untuk menyatakan bahwa "implikasi strategis dari perjanjian itu tidak kekurangan pengubah permainan."<sup>123</sup>

Meskipun Uni Emirat Arab menekankan potensi Accords untuk melibatkan perdamaian, stabilitas, dan moderasi di kawasan bahkan membayangkan dirinya sebagai penasihat Turki dan mediator antara Iran dan Israel Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Gargash menyampaikan bahwa perjanjian itu adalah keputusan strategis yang akan meningkatkan Postur pertahanan Uni Emirat Arab di wilayah tersebut. Pada akhirnya, eskalasi ketegangan regional dan amplifikasi masalah keamanan mengubah lanskap strategis pada tahun 2020 menjadi satu kondusif untuk normalisasi resmi hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel sehingga kedua negara dapat secara efektif membela terhadap ancaman Iran, Turki, dan proksi di seluruh wilayah.<sup>124</sup>

## **B. Faktor Mediasi Amerika Serikat**

Ketika Presiden Trump mengungkapkan "Kesepakatan Abad Ini" pemerintahannya yang bertujuan untuk secara meyakinkan menyelesaikan konflik Israel-Palestina, banyak yang skeptis tidak hanya tentang isi plan tetapi juga

<sup>123</sup> Ali Alfoneh, "Iran Reacts Angrily to the UAE-Israel Landmark Agreement," Arab Gulf States Institute in Washington, 17 Agustus 2020.

<sup>124</sup> Ebtessam al-Ketbi, "Emirati-Israeli Peace Agreement: Could It Be a Game-Changer?" Emirates Policy Center, September 24, 2020; Hijab Shah and Melissa Dalton, "Evolving UAE Military and Foreign Security Cooperation: Path Toward Military Professionalism," Carnegie Middle East Center, 12 Januari 2021.

tentang kemandirian Amerika Serikat sebagai mediator kesepakatan perdamaian.<sup>125</sup> Bahkan, negosiator perdamaian veteran Timur Tengah Aaron David Miller menggambarkan rencana itu sebagai "kerangka kerja yang mungkin telah menggantung tanda tertutup untuk musim ini baik pada proses perdamaian yang mampu dankredibilitas Amerika sebagai broker yang adil danefektif." Sebagian besar kekhawatiran ini berasal dari persepsi bahwa Presiden Trump dan penasihat senior Jared Kushner mengubah resolusi yang telah lama ditunggu-tunggu untuk konflik Israel-Palestina menjadi "produk utama pengacara pro-Israel yang terbaik," meninggalkan tanggung jawab mereka sebagai mediator pihak ketiga yang kredibel untuk broker atas nama kedua belah pihak. Dalam ketiga kasus keberhasilan masa lalu dalam hal negosiasi perdamaian untuk Israel, AS berhasil mewakili kepentingan kedua belah pihak.<sup>126</sup>

Namun, terlepas dari kurangnya kepercayaan pada kapasitas Amerika untuk bermeditasi perdamaian di Timur Tengah, pemerintahan Trump menunjukkan kemampuan diplomatiknya dalam Abraham Accords antara Israel dan Uni Emirat Arab, serta negara-negara bagian berikutnya yang ingin memanfaatkan hubungan yang dinormalisasi dengan Israel. Keberhasilan upaya mediasi AS sebagian besar dapat dikaitkan dengan pengabaian semata-mata "broker pro-Israel."<sup>127</sup>

Duta Besar Al Otaiba, mengungkapkan bahwa pembicaraan tentang normalisasi pertama kali dimulai ketika Uni Emirat Arab mendekati AS tentang ketidakpuasan mereka seputar proposal Israel untuk aneksasi, dan publikasi untuk

---

<sup>125</sup> Lior Lehrs, "Is Trump's 'Deal of the Century' Really a Peace Plan?" Middle East Institute, 20 Mei 2019.

<sup>126</sup> Aaron David Miller, "I'm a Veteran Middle East Peace Negotiator. Trump's Plan Is the Most Dangerous I've Ever Seen.," Carnegie Endowment for International Peace, 27 Februari 2020.

<sup>127</sup> *Ibid.*

menyelidiki respons terhadap gagasan normalisasi yang secara efektif menghasut prosesnegosiasi. Sebagai lawan dari prospek mediasi pro-Israel secara ketat dari kesepakatan Israel-Palestina, Al Otaiba melaporkan "jumlah kepercayaan yang luar biasa" dengan pemerintahan Trump transaksional, mengatakan bahwa dalam empat minggu sebelum pengumuman, he berbicara lebih banyak dengan pejabat seperti Kushner dan AviBerkowitz daripada yang dia lakukan dengan keluarganya sendiri.<sup>128</sup> Meskipun Al Otaiba mengkreasi AS dengan banyak keberhasilan Accords, intelektual Emirati terkemuka Dr. Abdulkhaleq Abdulla berpendapat bahwa AS tidak menekan Uni Emirat Arab atau memimpin keputusan untuk menormalkan hubungan, menegaskan bahwa Uni Emirat Arab menegosiasikan perjanjian dengan persyaratannya sendiri dan memiliki kebebasan untuk mundur kapan pun ia mau.<sup>129</sup>

Terlepas dari tingkat di mana AS memainkan peran aktif dalam negosiasi, AS tidak hanya membuktikan keterampilan mediasi mereka yang merata — seperti yang ditunjukkan dalam kesepakatan mereka berikutnya antara negara-negara Arab dan Israel tetapi juga menegaskan kembali perannya sebagai pemain penting di Timur Tengah dan sekutu yang sangat diperlukan untuk Israel dan Uni Emirat Arab. Dalam makalahnya tentang hubungan antara Israel dan negara-negara Teluk, Elisheva Rosman-Stollman berpendapat bahwa para aktor ini tertarik pada strategi penyeimbangan dengan "beralih ke Amerika Serikat sebagai hegemonik namun tidak bertele-cita kekuasaan dan menggunakan Israel sebagai

---

<sup>128</sup> Jacob Magid, "UAE Envoy: We're Not a Democracy, but Public Support Allowed for Normalization," *The Times of Israel*, 29 September 2020.

<sup>129</sup> Belfer Center for Science and International Affairs, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, 8 Oktober 2020.

cara *kari favour* dengan hegemoni," yang memberi insentif kepada negara-negara Teluk untuk mengejar normalisasi.<sup>130</sup>

Penting untuk dicatat bahwa penegasannya bahwa Israel saja tidak bisa menjadi sekutu yang efektif untuk negara-negara Teluk diterbitkan pada tahun 2004; namun, gagasan bahwa St Teluk makanmemandang hubungan persahabatan dengan Israel sebagai sarana untuk tumbuh lebih dekat ke AS tetapmerupakan dimensi penting pengaruh AS di Timur Tengah. Meskipun AS telah perlahan-lahan mengurangi aktivitas langsungnya di kawasan ini, Accordsmemperkuat sekutu utamanya untuk memastikan dukungan masa depan mereka, "menyediakan garis hidup untuk pengaruh AS yang berkelanjutan di kawasan dan memperkuat keterlibatan baik secara strategis maupun ekonomi."<sup>131</sup> Meskipun ketergantungan Israel yang sudah lama pada AS sebagai sekutudan pelindung adalah milik baik bersama dengan hubungan dekat Trump danNetanyahu deskripsi Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab tentang AS sebagai "sekutu strategis paling penting" Uni Emirat Arab semakin menandakan ketergantungan kedua negara terhadap dukungan dan kekuatan Amerika di kawasan tersebut.<sup>132</sup>

Salah satu area di mana AS memainkan peran penting dalam memfasilitasi Abraham Accords adalah penjualan jet F-35 ke Uni Emirat Arab. Terutama, AS memiliki tradisi perdagangan pasokan militer untuk perdamaian dengan Israel, dengan Mesir memperoleh paket bantuan militer terbesar kedua di Timur Tengah pada tahun 1979 dan Yordania mengamankan keringanan utang dan pesawat

---

<sup>130</sup> Elisheva Rosman-Stollman, "Balancing Acts: The Gulf States and Israel," *Middle Eastern Studies* 40, no. 4 (2004): 185- 208.

<sup>131</sup> Hijab Shah and Melissa Dalton, "Evolving UAE Military and Foreign Security Cooperation: Path Toward Military Professionalism," *Carnegie Middle East Center*, 12 Januari 2021.

<sup>132</sup> Anwar Gargash, "UAE's Anwar Gargash Says Israeli Pact Is 'Sovereign' Decision," interview by Manus Cranny, *Bloomberg Markets*, 24 Agustus 2020.

tempur F-16 pada tahun 1994.<sup>133</sup> Selain 18 drone MQ-9 Reaper, AS juga setuju untuk menjual 50 pesawat tempur gabungan F-35 ke Uni Emirat Arab. Tidak hanya keuntungan AS dari pasar baru ini untuk peralatan militer terutama dengan upaya Cina untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan melalui perdagangan tetapi AS juga mampu "mengubah lanskap strategis kawasan ini," dalam kata-kata Menteri Luar Negeri saat itu Mike Pompeo, yang menggambarkan kesepakatan senjata sebagai "pengakuan atas hubungan pendalaman kami dan perlunya kemampuan pertahanan canggih untuk mencegah dan mempertahankan diri terhadap ancaman yang meningkat dari Iran."<sup>134</sup>

Sementara Israelis menyuarakan keprihatinan dan ketidaksetujuan mereka terhadap pengelakan Amerika terhadap Israel Qualitative Military Edge Act of 2017, yang melarang penjualan senjata bertekstik tinggi ke negara-negara TimurTengah lainnya yang akan membahayakan kemampuan Israel untuk mempertahankan diri, th adalah kritik sebagian besar telahmereda, mungkin menunjukkan kepercayaan dan kerja sama pertahanan yang lebih besar antara mitra baru. Dan meskipun Presiden Joe Biden baru-baru ini membekukan \$ 23 miliar penjualan F-35s dan MQ-9s ke Uni Emirat Arab, Duta Besar Al Otaiba menyatakan kurangnya kekhawatirannya atas pembekuan, menyebutnya "rutinitas latihan."<sup>135</sup>

Demonstrasi lain dari peran dominan AS di kawasan ini serta ketergantungan Uni Emirat Arab dan Israel yang terus-menerus terhadap AS

---

<sup>133</sup> Barbara A. Leaf and Dana Stroul, "The F-35 Triangle: America, Israel, the United Arab Emirates," *War on the Rocks*, 15 September 2020.

<sup>134</sup> Aaron Mehta, "US State Dept. Approves UAE's Purchase of F-35 Jets, MQ-9 Drones," *Defense News*, 10 November 2020.

<sup>135</sup> Jacob Magid, "UAE Ambassador: 'Abraham Accords Were about Preventing Annexation'," *The Times of Israel*, 2 Februari 2021.

sebagai sekutu adalah upaya Amerika untuk mengekang proliferasi nuklir Iran. Seiring dengan penarikannya pada 2018 dari JCPOA, mantan Presiden Trump mengejar strategi "tekanan maksimum" terhadap Iran, termasuk sanksi yang berkembang, pembunuhan yang ditargetkan, dan retorika yang bermusuhan.<sup>136</sup> Meskipun pendekatan agresif terhadap Iran ini didukung oleh Uni Emirat Arab dan Israel, dasar umum yang mungkin telah berkontribusi pada kemudahan relatif yang dengannya ketiga pemimpin mampu menyelesaikan Accords-AS terus memainkan peran dominan di masa depan JCPOA dan proliferasi nuklir Iran, terlepas dari Presiden Preferensi Biden untuk langkah-langkah diplomatik yang lebih.<sup>137</sup> Dengan ketidakpatuhan Iran terhadap ketentuan pusat dalam perjanjian 2015 dan langkah berani baru-baru ini menuju proliferasi nuklir bersama dengan penolakan Biden untuk mengingkar sanksinya Iran dan AS berjuang untuk bertemu dengan kesepakatan bersama di mana pembicaraan nuklir dapat dilanjutkan.<sup>138</sup> Pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh november 2020, ilmuwan nuklir top Iran, semakin meningkatkan ketegangan antara AS dan Iran, dan Uni Emirat Arab dan Israel perlu menjaga hubungan dekat dan stabil dengan pemerintahan Biden untuk memastikan bahwa prospek proliferasi nuklir Iran mereda dan lenyap.<sup>139</sup>

Sementara sejauh mana keterlibatan aktif AS dalam negosiasi tidak tains, AS mencontohkan perannya yang sangat diperlukan sebagai broker dan aktor regional, baik dalam mendukung dan memiliki kepentingannya pada Uni Emirat

---

<sup>136</sup> Meredith McGraw, "Trump's 'Maximum Pressure' Peaks Just before Election," POLITICO, 19 September 2020.

<sup>137</sup> Abigail Ng, "Middle East Leaders Praise Trump's 'Maximum Pressure' Campaign on Iran as Biden Takes Office," CNBC, 22 Januari 2021.

<sup>138</sup> Najmeh Bozorgmehr, "Iran Ready to Resume Nuclear Talks If US Lifts Sanctions within a Year," Financial Times, 5 Maret 2021.

<sup>139</sup> Farzan Sabet, "How the Assassination of an Iranian Scientist Could Affect Nuclear Negotiations with Iran," The Washington Post, 11 Desember 2020.

Arab dan Israel. Keinginan bagi Uni Emirat Arab untuk mengakuisisi jet F-35 dan teknologi senjata canggih lainnya serta konvergensi kepedulian atas meningkatnya ancaman nuklir Iran menciptakan dinamika antara ketiga negara yang kondusif untuk mediasi yang sukses di pihak Amerika Serikat. Ketergantungan bersejarah Uni Emirat Arab dan Israel pada AS dan perlunya kemitraan dan dukungan strangkik Amerika tidak hanya mempromosikan meningkatnya normalisasi hubungan mereka, tetapi asimetri ini juga memainkan peran yang berkontribusi dalam Accords itu sendiri. Partisipasi AS dalam Accords memberikan keuntungan strategis kepada Uni Emirat Arab dan Israel dan membawa mereka ke dalam kemitraan yang lebih erat dengan AS, tetapi demonstrasi AS sebagai broker yang sukses juga memungkinkan "efek domino" untuk terjadi, dengan selanjutnya kesepakatan dengan Bahrain, Sudan, dan Maroko semakin memperkuat posisi strategis Uni Emirat Arab dan Israel di kawasan tersebut.<sup>140</sup>

### **C. Faktor Palestina**

Sebelum Abraham Accords, normalisasi negara-negara Arab dengan Israel diasumsikan sebagai prakondisi tentang penyelesaian komprehensif konflik Israel-Palestina. Tidak hanya hambatan ini yang banyak dibahas dalam wacana akademik normalisasi, tetapi prasyarat ini juga merupakan satu-satunya faktor accentuyang di ated dalam urutan yang diduga normalisasi. Lagi pula, ada komitmen regional yang tak terhitung jumlahnya untuk prakondisi ini, terutama Inisiatif Perdamaian Arab 2002 dan afirmasi berulang oleh para pemimpin negara

---

<sup>140</sup> Hijab Shah and Melissa Dalton, "Evolving UAE Military and Foreign Security Cooperation: Path Toward Military Professionalism," Carnegie Middle East Center, 12 Januari 2021.

dan pemerintah kesetiaan mereka terhadap creation dari negaraPalestina.<sup>141</sup> Bahkan, hanya tiga bulan sebelum pengumuman normalisasi Uni Emirat Arab-Israel, analis Timur Tengah Aaron David Miller mengungkapkan keraguannya atas normalisasi penuh antara Israel dan negara-negara Teluk karena nt atase yangterakhir untuk penyebab Palestina, keliru menyimpulkan bahwa "sekali lagi perdamaian tidak pernah ada dalam kartu".

Fakta bahwa Uni Emirat Arab sepenuhnya menormalkan hubungan dengan Israel terutama dengan tidak adanya kesepakatan perdamaian Palestina prasyarat dan upaya alisasi norma plurilateral mengejutkan banyakorang. Dominasi dukungan Pan-Arab terhadap penyebab Palestina di kawasan itu, serta kekuatan ketergantungan jalur atas oposisi Arab terhadap normalisasi tanpa adanya pemukiman dengan palestina, keduanya kuat forces yang menghambat normalisasi resmi Arab-Israel selama beberapa dekade.<sup>142</sup>

Namun, negara Palestina yang merdeka juga pernah diyakini sebagai prasy prasyuga untuk segala jenisommunikasi atau interaksi antara Israel dan dunia Arab, yang jelas terjadi, meskipun demikian. Seperti yang dijelaskan Jones dan Guzansky dalam buku mereka,

"Di mana sekali resolusi untuk pertanyaan Palestina dianggap sebagai prasyarat untuk setiap dialog antara Israel dan tetangga Arabnya, realitas Timur Tengah kontemporer menciptakan lingkungan di mana pragmatisme yang lahir dari kebutuhan strategis mendorong isu Palestina ke

<sup>141</sup>Reuters, "Saudi Remains Committed to Arab Peace Initiative for Israel Peace, Foreign Minister Says," 19 Agustus 2020, <https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-saudi-idUSKCN25F1TQ>, [Diakses 9 Juni 2021].

<sup>142</sup>Aaron David Miller, "Opinion: How Israel and the Arab World Are Making Peace Without a Peace Deal," POLITICO, 28 Mei 2020.



margin."<sup>143</sup>

Oleh karena itu, jika pergeseran realitas strategis dan kebutuhan wilayah tdia cukup besar untuk mengesampingkan hambatan yang mapan untuk setiap dialog antara Israel dan negara-negara Teluk, mengapa diasumsikan bahwa tidak dapat dilakukan lagi? Dalam merefleksikan Accords, Miller mengakui bahwa para ahli termasuk dirinya adalah kesalahan dalam pernyataan mereka sebelumnya tentang kemajuan Arab-Israel karena “asumsi lama mereka”.<sup>144</sup> Sama seperti pergeseran kepentingan regional memfasilitasi kontak awal antara Israel dan negara-negara Teluk di tengah kesetiaan vokal terhadap penyebab Palestina, palung brini pada tahun2020 dimungkinkan karena prioritas regional telah berubah. Pertama, kepentingan Emirati dan Israel semakin menyatu termasuk ketakutan bersama terhadap Iran dan kelompok proksinya dan manfaat tumbuhnya ties ekonomidan teknologi. Selain itu, di tengah tren menurunnya persatuan Arab dan Persatuan Islam, negara-negara Teluk kurang peduli dengan penyebab Palestina yang stagnan daripada mereka dengan masalah domestik dan keamanan mereka sendiri.<sup>145</sup>

Namun, fakta bahwa masalah regional yang signifikan menurunkan penyebab Palestina sebagai hambatan mendasar untuk normalisasi Arab-Israel tidak menyangkal konflik Israel-Palestina pengaruh dan pengaruhnya dalam upaya normalisasi ini. Namun, bukan hambatan yang efektif untuk normalisasi, palestina menjadi kepentingan lain bagi kedua belah pihak untuk

---

<sup>143</sup> Clive Jones and Yoel Guzansky, *Fraternal Enemies: Israel and the Gulf Monarchie*, New York, NY: Oxford University Press, 2019.

<sup>144</sup> Aaron David Miller, “Arab-Israeli Progress Seemed Impossible. That's Because of Old Assumptions.,” *Carnegie Endowment for International Peace*, 23 September 2020.

<sup>145</sup> Hillel Frisch, “The Israel-UAE Agreement’s Greatest Achievement: Little Arab Protest,” Edited by Efraim Karsh, *Mideast Security and Policy Studies* No. 180 September 2020, Hal 6-8.

dipertimbangkan. Bahkan, upaya Israel untuk mencaplok bagian-bagian wilayah Palestina berfungsi sebagai peluang yang sangat baik bagi Uni Emirat Arab dan Israel untuk mengejar kesepakatan "quid-pro-quo" yang tidak dipunyai kedua belah pihak.<sup>146</sup>

Anwar Gargash, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, secara langsung menjelaskan dan mengakui bahwa Abraham Accords sementara tidak akan pernah ada "momen sempurna" untuk normalisasi dengan Israel, menunggu waktu yang ideal seperti itu akan berarti "berdiri diam dan membiarkan perkembangan semacam melewati Anda," yang katanya "telah terjadi dengan masalah Palestina secara historis".<sup>147</sup> Dalam wawancara terpisah, Gargash menguraikan waktu dan kondisi di mana UEA memutuskan untuk mengejar normalisasi resmi dengan Israel, menunjukkan bahwa hubungan formal sudah dekat, terlepas dari aneksasi:

"Perhitungan kami sangat, sangat jelas. Perhitungan kami adalah, di satu sisi, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu sementara pada saat yang sama mencapai sesuatu sehubungan dengan menghentikan aneksasi. Dan saya pikir ini sangat sukses dengan secara rasional dan realistis datang dan berkata, 'kami meresmikan situasi yang berkembang. Di sinilah hubungan akan pergi tahun depan atau tahun setelahnya. Mengapa kita tidak melakukannya sekarang?' Dan jika kita melakukannya sekarang, kita benar-benar bisa mendapatkan sesuatu sebagai imbalan untuk mendukung dan membantu daerah. Dan saya pikir kami baru saja mencapai itu."<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> Jacob Magid, "UAE Envoy: We're Not a Democracy, but Public Support Allowed for Normalization," *The Times of Israel*, 29 September 2020.

<sup>147</sup> Jacob Magid, "UAE Envoy: We're Not a Democracy, but Public Support Allowed for Normalization," *The Times of Israel*, 22 Januari 2021.

<sup>148</sup> Anwar Gargash, "UAE's Anwar Gargash Says Israeli Pact Is 'Sovereign' Decision," interview by Manus Cranny, *Bloomberg Markets*, 14 Agustus 2020.

Lebih lanjut Gargash menjelaskan bahwa gagasan untuk "win-win solution" muncul from kekhawatiran universal yang diungkapkan dalam pertemuan Liga Arab atas aneksasi yang mengancam untuk menyabotase prospek apa pun untuk solusi dua negara.<sup>149</sup> Duta Besar Al Otaiba menggemakan narasi ini bahwa Accords dikejar sebagai langkah untuk mencegah aneksasi, menyatakan bahwa "keindahan Abraham Accords adalah kesederhanaannya: Tidak ada aneksasi untuk normalisasi."<sup>150</sup>

Meskipun Uni Emirat Arab dengan tegas mempromosikan Abraham Accords ini, perlu diperhitungkan bahwa tidak semua orang mendapatkan penjelasan ini. Beberapa orang memandang kesepakatan itu sebagai "oportunisme politik yang dingin dan keras diambil dengan mengorbankan warga Palestina," menegaskan bahwa Uni Emirat Arab mungkin telah berusaha untuk mewakili dirinya sebagai "penyelamat Arab Palestina, tetapi kenyataannya adalah bahwa hak-hak palestinadan hak-hak pewaris tidak ada hubungannya dengan itu."<sup>151</sup> Sebagai lawan dari persepsi ini tentang pengkhianatan terang-terangan terhadap penyebab Palestina, yang lain hanya memandang aneksasi sebagai kesempatan yang disengaja yang memungkinkan Kushner untuk "[menghasilkan] aset dari apa-apa" dan Netanyahu untuk menemukan jalan keluar dari janjinya tentang aneksasi yang tidak memiliki persetujuan dari pemerintahan Trump. Dalam pengertian ini, banyak yang memandang isu Palestina sebagai "chip tawar-

---

<sup>149</sup> Abigail Ng, "Middle East Leaders Praise Trump's 'Maximum Pressure' Campaign on Iran as Biden Takes Office," CNBC, 22 Januari 2021.

<sup>150</sup> Jacob Magid, "UAE Envoy: We're Not a Democracy, but Public Support Allowed for Normalization," The Times of Israel, 29 September 2020.

<sup>151</sup> Zaha Hassan, "The Israel-UAE Accord Is a Mere Sideshow," Carnegie Endowment for International Peace, 19 Agustus 2020.

menawar fiktif" yang dibuat semata-mata untuk memfasilitasi Accords.<sup>152</sup> Meskipun mendukung aneksasi, Profesor Shmuel Trigano meneliti alasan untuk mempublikasikan aneksasi 1 Juli, hanya agar Netanyahu akhirnya menanggukkan rencana tersebut:

Pada titik ini, mengecewakan mendengar PM mengumumkan datangnya perpanjangan hukum Israel dengan cara yang hampir obsesif, gagal menerapkannya, dan kemudian berhenti sepenuhnya untuk membahasnya. Mengapa mengumumkannya jika tidak ada niat untuk menempatkannya di tempat? Yang dia capai adalah menyatukan dunia dalam pertentangan dengan Israel tanpa tujuan.<sup>153</sup>

Meskipun konspirasi thpada rencana aneksasi hanya dibangun untuk berfungsi sebagai leverage untuk mencapai normalisasi tidak berdasar, konsepsi bahwa aneksasi hanya digunakan sebagai chip tawar-menawar dalam negosiasi — seperti yang diungkapkan oleh Uni Emirat Arab diterima secara luas.

Meskipun tidak disetujui oleh pemerintah Arab, pejabat, dan kelompok di wilayah itu yang tidak berbahaya dibandingkan dengan reaksi keras dan parah pada tahun 1979 dan 1994 Uni Emirat Arab telah menghadapi kritik ini dengan penegasan dukungan tegas untuk Palestina.<sup>154</sup> Tidak hanya Uni Emirat Arab mendahului seluruh perjanjian tentang penghapusan aneksasi dan perlindungan rakyat Palestina, tetapi Uni Emirat Arab juga menggambarkan Accords sebagai langkah strategis untuk mengambil peran yang lebih terlibat dan kuat dalam

---

<sup>152</sup> Tamir Sinai and Tova Norlen, "The Abraham Accords – Paradigm Shift or Realpolitik?" (George C. Marshall European Center For Security Studies, Oktober 2020).

<sup>153</sup> Shmuel Trigano, "The Abraham Accords: Contrasting Reflections," Maret 2021.

<sup>154</sup> Akhbar Alsa, "Editorial: UAE's Position on the Palestinian Cause Is Unequivocal," Emirates Center for Strategic Studies and Research, 12 September 2020.

mengadvokasi penyebab Palestina.<sup>155</sup> Lebih lanjut, beberapa orang sangat optimis bahwa Accords dapat secara paradoks memfasilitasi penyelesaian perdamaian antara Israel dan Palestina. Sementara banyak yang menolak kemungkinan saran Netanyahu pada 2017 bahwa "normalisasi dengan negara-negara Arab dapat membantu membuka jalan bagi perdamaian dengan rakyat Palestina,"

Realitas politik dan lingkungan regional baru ini telah secara efektif menghilangkan kekuatan veto Palestina pada keterlibatan Arab dengan Israel. Dengan membalikkan urutan preconceived untuk normalisasi dan perdamaian di Timur Tengah dan memberikan Uni Emirat Arab peran lobi strategis potensial atas nama Palestina, Accords bahkan mungkin memiliki potensi untuk menjadi langkah pertama untuk memfasilitasi solusi yang telah lama ditunggu-tunggu pada konflik Israel-Palestina.

Meskipun API 2002 telah gagal bertahan sebagai kerangka kerja di mana negara-negara Arab meresmikan hubungan dengan Israel, masalah Palestina tetap menjadi faktor sentral dalam negosiasi untuk normalisasi. Bahkan, Uni Emirat Arab percaya bahwa Palestina tidak diragukan lagi adalah elemen utama dari perjanjian. Namun, apakah Uni Emirat Arab benar-benar ingin melindungi Palestina dan tujuan mereka dengan biaya apa pun atau hanya ingin menuai manfaat strategis dan ekonomi dari kerja sama normal dengan Israel sebagian besar tidak relevan ketika menganalisis peran aneksasi dalam memfasilitasi Abraham Accords. Dengan aneksasi yang dijadwalkan dimulai pada 1 Juli, terbukti bahwa aneksasi adalah kesempatan yang sempurna dan 'matang' bagi ketiga pihak yang terlibat untuk mengamankan perjanjian normalisasi yang saling

---

<sup>155</sup> Ebtessam al-Ketbi, "Emirati-Israeli Peace Agreement: Could It Be a Game-Changer?" Emirates Policy Center, 24 September 2020.

menguntungkan, terlepas dari niat dan sikap mereka yang sebenarnya terhadap aneksasi dan penyebab Palestina.<sup>156</sup> Pada akhirnya, waktu Accords sebagian besar kontingen pada insiden aneksasi yang dijadwalkan sebulan sebelumnya, yang berfungsi sebagai kesempatan bagi ketiga negara untuk bertindak atas perubahan strategic dan perkembangan keamanan di wilayah yang menjamin perjanjian normalisasi formal antara Uni Emirat Arab dan Israel. Seperti yang dijelaskan Duta Besar Al Otaiba, mungkin lebih tulus daripada yang awalnya terlihat, "kenyataannya adalah bahwa Abraham Accords were tentang mencegah aneksasi. Alasan itu terjadi, cara itu terjadi, pada saat itu terjadi adalah untuk mencegah aneksasi."<sup>157</sup> Sekali lagi, sentimen asli terhadap aneksasi tidak signifikan, karena tanpa aneksasi untuk berfungsi sebagai leverage, abu Anwar Gargdan wilayah Teluk kemungkinan masih akan menunggu "momen sempurna" untuk secara resmi menormalkan hubungan dengan Israel.<sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> BBC News, "Explainer: Israel, Annexation and the West Bank", 25 Juni 2020, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52756427>, [Diakses 10 Juni 2021].

<sup>157</sup> Jacob Magid, "UAE Ambassador: 'Abraham Accords Were about Preventing Annexation'," The Times of Israel, 2 Februari 2021.

<sup>158</sup> Abigail Ng, "Middle East Leaders Praise Trump's 'Maximum Pressure' Campaign on Iran as Biden Takes Office," CNBC, 22 Januari 2021.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Pengumuman Abraham Accords datang sebagai kejutan bagi banyak orang, bahkan bagi mereka yang memiliki pemahaman proper tentang kerja sama taktik puluhan tahun antara Israel dan Uni Emirat Arab. Dalam pengertian ini, Accords tidak terduga karena waktu dan kondisi di mana normalisasi Arab dengan Israel terjadi, yang menentang anggapan lama penyelesaian perdamaian komprehensif dengan Palestina dan perjanjian plurilateral berikutnya antara Israel dan Liga Arab.

Perjanjian Abraham Accords berbeda dalam banyak hal dari pendahulunya. Berbeda dengan perjanjian damai Israel dengan Mesir dan Yordania, Uni Emirat Arab tidak pernah dalam keadaan perang dengan Israel, dan kepentingan regional dan opini publik telah bergeser jauh dalam beberapa waktu terakhir. Lebih lanjut, berbeda dengan 'perdamaian dingin' dengan Mesir dan Yordania, hubungan informal Israel selama beberapa dekade dengan Uni Emirat Arab telah dengan tepat mempersiapkan kedua negara untuk 'perdamaian hangat' yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Perubahan Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab menggambarkan bagaimana tiga faktor mendasar bertemu sebagai peluang sempurna bagi Uni Emirat Arab dan Israel untuk secara resmi membuka hubungan diplomatik pada Agustus 2020, termasuk perubahan lanskap keamanan, peran Amerika Serikat, dan penyebab Palestina. Sementara meningkatnya ancaman Iran dan kapasitas AS sebagai broker dan sekutu berharga semakin memajukan momentum menuju

normalisasi deal dengan meningkatkan manfaat untuk meningkatkan kerja sama, waktu yang tepat dari perjanjian itu adalah hasil dari aneksasi.

Potensi perdamaian hangat antara Uni Emirat Arab dan Israel dalam pembukaan hubungan diplomatik sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu (1). Pembukaan hubungan diplomatik Uni Emirat Arab terhadap Israel dipengaruhi oleh kepentingan nasional Uni Emirat Arab untuk meningkatkan kekuatan militer dalam menjaga keamanan nasionalnya. (2). Pembukaan Hubungan diplomatik Uni Emirat Arab terhadap Israel adalah hasil mediasi dari Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump dalam Perjanjian Abraham. (3). Pembukaan Hubungan diplomatik Uni Emirat Arab terhadap Israel juga dipengaruhi oleh Konstelasi politik timur tengah yang dinamis terutama kepentingan Uni Emirat Arab dalam membendung dominasi Iran. (4). Palestina juga menjadi salah satu alasan mengapa Uni Emirat Arab membuka hubungan diplomatik terhadap Israel dengan tujuan untuk menghentikan aneksasi Israel di wilayah tepi barat Palestina. (5). Pembelian perangkat teknologi Israel oleh Uni Emirat Arab yakni perangkat keamanan seperti Satelit dan CCTV juga turut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembukaan hubungan diplomatik Uni Emirat Arab terhadap Israel.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bakry, Umar S, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,(2016).
- F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta (1994).
- Felix E. Oppenheim, *Political Theory: National Interest, Rationality, and Morality*, Vol. 15, No. 3, Sage Publications Inc, California, (1987).
- Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Alfred A Knopf Inc., 5, New York, (1985), hal. 265.
- James N. Ronesau, *International Poltics and Foerign Policy: A Reader in Research and Theory*, The Free Press, New York, (1969), hal. 167.
- James N. Rosenau. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press,(1980).
- Joshua Goldstein, *International Realtions*, Longman, New York, (1999).
- K. J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, Prentice Hall. Inc, Angelwood Clipps, New Jersey, (1997).
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta (2016).
- Yani, Anak Agung Banyu Permita dan Yanyan Mochamad, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, (2017).

## Journal

Aaron David Miller, "Arab-Israeli Progress Seemed Impossible. That's Because of Old Assumptions," Carnegie Endowment for International Peace, 23 September 2020.

Aaron David Miller, "I'm a Veteran Middle East Peace Negotiator. Trump's Plan Is the Most Dangerous I've Ever Seen.," Carnegie Endowment for International Peace, 27 Februari 2020.

Aaron David Miller, "Opinion: How Israel and the Arab World Are Making Peace Without a Peace Deal," POLITICO, 28 Mei 2020.

Aaron Mehta, "US State Dept. Approves UAE's Purchase of F-35 Jets, MQ-9 Drones," Defense News, 10 November 2020.

Abigail Ng, "Middle East Leaders Praise Trump's 'Maximum Pressure' Campaign on Iran as Biden Takes Office," CNBC, 22 Januari 2021.

Abigail Ng, "Middle East Leaders Praise Trump's 'Maximum Pressure' Campaign on Iran as Biden Takes Office," CNBC, 22 Januari 2021.

Abigail Ng, "Middle East Leaders Praise Trump's 'Maximum Pressure' Campaign on Iran as Biden Takes Office," CNBC, 22 Januari 2021.

Adam Barston, *The Dialog Between States*, London, (1984), hal. 223.

Akhbar Alsa, "Editorial: UAE's Position on the Palestinian Cause Is Unequivocal," Emirates Center for Strategic Studies and Research, 12 September 2020.

Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, (2008), hal. 67.

Ali Alfoneh, "Iran Reacts Angrily to the UAE-Israel Landmark Agreement," Arab Gulf States Institute in Washington, 17 Agustus 2020.

Anwar Gargash, "UAE's Anwar Gargash Says Israeli Pact Is 'Sovereign' Decision," interview by Manus Cranny, Bloomberg Markets, 24 Agustus 2020.

Anwar Gargash, "UAE's Anwar Gargash Says Israeli Pact Is 'Sovereign' Decision," interview by Manus Cranny, Bloomberg Markets, 14 Agustus 2020.

Ash Carter, Remarks on The Logic of American Strategy in the Middle East, U.S Department of Defense, Desember, 2016.

Barbara A. Leaf and Dana Stroul, "The F-35 Triangle: America, Israel, the United Arab Emirates," War on the Rocks, 15 September 2020.

Belfer Center for Science and International Affairs, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, 8 Oktober 2020.

Ceramah Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Sesko TNI AU) Angkatan ke-44 TP 2007, Bandung, 16 Mei 2007.

Chris Stephen dan Anne Penketh, "Ibu Kota Libya di bawah Kendali Islam setelah Bandara Tripoli Disita", The Guardian, 24 Agustus 2014.

Clive Jones and Yoel Guzansky, *Fraternal Enemies: Israel and the Gulf Monarchie*, New York, NY: Oxford University Press, 2019.

Danny Citrinowicz, "Israel and the UAE on Iran: Shared Foe, Different Perspectives," The Washington Institute, 1 September 2020.

Danny Citrinowicz, "Israel and the UAE on Iran: Shared Foe, Different Perspectives," The Washington Institute, 1 September 2020.

Ebtesam al-Ketbi, "Emirati-Israeli Peace Agreement: Could It Be a Game-Changer?" Emirates Policy Center, September 24, 2020; Henri J. Barkey, "The UAE-Israel Agreement Isn't Only About Iran. There's Also Turkey.," Council on Foreign Relations (Council on Foreign Relations), 21 September 2020.

Ebtesam al-Ketbi, "Emirati-Israeli Peace Agreement: Could It Be a Game-Changer?" Emirates Policy Center, September 24, 2020; Hijab Shah and Melissa Dalton, "Evolving UAE Military and Foreign Security Cooperation: Path Toward Military Professionalism," Carnegie Middle East Center, 12 Januari 2021.

Ebtesam al-Ketbi, "Emirati-Israeli Peace Agreement: Could It Be a Game-Changer?" Emirates Policy Center, 24 September 2020.

Elisheva Rosman-Stollman, "Balancing Acts: The Gulf States and Israel," *Middle Eastern Studies* 40, no. 4 (2004): 185- 208.

Erick Clark, *The World of International Diplomacy*, Taplinger New York, (1973), hal. 83.

Farzan Sabet, "How the Assassination of an Iranian Scientist Could Affect Nuclear Negotiations with Iran," *The Washington Post*, 11 Desember 2020.

Frederic Wehrey, *The Burning Shores: Inside the Battle for the New Libya* (New York, 2018), 93–94.

Garrett Nada, “Iran's Confrontation with Israel over Four Decades,” *The Iran Primer*, 21 Januari 2020.

Garrett Nada, “Iran's Confrontation with Israel over Four Decades,” *The Iran Primer*, 21 Januari 2020.

Hans Joachim Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Alfred A Knopf Inc., 5, New York, (1985), hal. 265.

Hijab Shah and Melissa Dalton, “Evolving UAE Military and Foreign Security Cooperation: Path Toward Military Professionalism,” *Carnegie Middle East Center*, 12 Januari 2021.

Hijab Shah and Melissa Dalton, “Evolving UAE Military and Foreign Security Cooperation: Path Toward Military Professionalism,” *Carnegie Middle East Center*, 12 Januari 2021.

Hijab Shah and Melissa Dalton, “Evolving UAE Military and Foreign Security Cooperation: Path Toward Military Professionalism,” *Carnegie Middle East Center*, 12 Januari 2021.

Hijab Shah dan Melissa Dalton, "Kerja Sama Militer dan Keamanan Asing UEA yang Berkembang: Jalan Menuju Profesionalisme Militer," *Carnegie Middle East Center*, 12 Januari 2021.

Hillel Frisch, “The Israel-UAE Agreement’s Greatest Achievement: Little Arab Protest,” Edited by Efraim Karsh, *Mideast Security and Policy Studies No. 180* September 2020, Hal 6-8.

Jacob Magid, "UAE Ambassador: 'Abraham Accords Were about Preventing Annexation'," *The Times of Israel*, 2 Februari 2021.

Jacob Magid, "UAE Ambassador: 'Abraham Accords Were about Preventing Annexation'," *The Times of Israel*, 2 Februari 2021.

Jacob Magid, "UAE Envoy: We're Not a Democracy, but Public Support Allowed for Normalization," *The Times of Israel*, 29 September 2020.

Jacob Magid, "UAE Envoy: We're Not a Democracy, but Public Support Allowed for Normalization," *The Times of Israel*, 29 September 2020.

Jacob Magid, "UAE Envoy: We're Not a Democracy, but Public Support Allowed for Normalization," *The Times of Israel*, 22 Januari 2021.

Jacob Magid, "UAE Envoy: We're Not a Democracy, but Public Support Allowed for Normalization," *The Times of Israel*, 29 September 2020.

Jean-Marc Rickli, "The Political Rationale and Implications of the United Arab Emirates' Military Involvement in Libya", dalam *Rationale Politik dan Konsekuensi Internasional Perang di Libya*, ed. Dag Henriksen dan Ann Karin Larssen (Oxford, 2016), 134–54 (142).

John Raine, "Iran, Its Partners, and the Balance of Effective Force," *War on the Rocks*, 18 Maret 2020.

John Raine, "Iran, Its Partners, and the Balance of Effective Force," *War on the Rocks*, 18 Maret 2020.

Karim Sadjadpour, *The Battle of Dubai: The United Arab Emirates and the U.S-Iran Cold War*, Cornege Endowment for International Piece, Juli, 2011, hal, 10.

Kenneth Katzman, *The United Arab Emirates (UAE): Issues for U.S Policy*, Congressional Research Service, Februari, 2017.

Kristian Coates Ulrichsen, *Uni Emirata Arab: Kekuasaan, Politik, dan Pembuatan Kebijakan* (London dan New York, 2017), 63–65.

Lior Lehrs, “Is Trump's ‘Deal of the Century’ Really a Peace Plan?” Middle East Institute, 20 Mei 2019.

Lynda Asiana Hukum, *Hukum dan Kebijakan Ekonomi: Studi Kasus One China Policy*, Pena Justisia, vol. 7 no. 1 (2017). Hal. 3.

Marc Daou, “Iran and Israel: A History of the World's Best Enmity,” France 24, 11 Mei 2018.

Matthew Lee and James LaPorta, “US, Israel Worked Together to Track and Kill Al-Qaida No. 2,” AP NEWS (Associated Press, November 15, 2020).

Meridith McGraw, “Trump's 'Maximum Pressure' Peaks Just before Election,” POLITICO, 19 September 2020.

MFA. *The Madrid Framework*, 28 Januari 1999.

Miroslav Nincic, *The review of Politics: The National Interest and Its Interpretation*, Vol.

Missile Threat, “Missiles of Iran,” *Missile Threat: CSIS Missile Defense Project* (Center for Strategic and International Studies), 7 Maret 2021.

Mitchel A. Belfer, Iranian Claims to Bahrain: From Rhetoric to Interference, RIPS 13, no. 2, 2014.

Mohammed Abdullah Al Roken, Dimensions of the UAE-Iran Dispute Over Three Islands, in United Arab Emirates: A New Perspective, ed Ibrahim Abed and Peter Hellyer, London, 2001.

Na'eem Jenaah, "Krisis Mesir: Dua Kudeta Kemudian, Militer Masih Memegang Kendali", dalam Mempromosikan Kepemimpinan Pemikiran Afrika Progresif, ed. Aziz Pahad, Garth le Pere dan Miranda Strydom (Pretoria: Institut Afrika Afrika Selatan, 2015), 41–53.

Najmeh Bozorgmehr, "Iran Ready to Resume Nuclear Talks If US Lifts Sanctions within a Year," Financial Times, 5 Maret 2021.

Nicholas Tandi Dammen, "Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri journal," Hukum Internasional 2 no. (2005): 713.

Nima Adelhah, Low Level Boundary Dispute Intensifies as Iran and the UAE Context Control of Strategic Gulf Islands, The Jamestown foundations, Mei, 2012.

Nima Adelhah, Low Level Boundary Dispute Intensifies as Iran and the UAE Context Control of Strategic Gulf Islands, The Jamestown foundations, Mei, 2012.

Pierre Bienaime, Armin Rosen, The Most Powerful Army You've Never Head Of, Business Insider, November 2016.



Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, "Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya dengan Israel," *middle east and Islamic studies* 7 (2020).

Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, "Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya dengan Israel."

Rajiv Chandra Sekaran, "In The UAE, the United States has a Quiet, Potent Ally Nicknamed Little Sparta," *The Washington Post*, November 2014.

Rauf Baker, "The Israel-UAE Peace Deal: A Master Stroke," Edited by Efraim Karsh, *Mideast Security and Policy Studies* No. 180 (September 2020): 17–19; "Arab Peace Initiative," S. Daniel Abraham Center for Peace, Accessed November 9, 2020.

Raúl Redondo, "Iran Warns UAE over Disputed Islands near Strait of Hormuz," *Atalayar*, 6 Oktober 2020.

Ray Takeyh, "Are Gulf Arab States Aligning Toward Israel?" *Council on Foreign Relations*, Council on Foreign Relations, August 17, 2020.

Seth J. Frantzman, "Al-Qaeda's Threat to Jews Spurred Operation to Kill Top Leader - Report," *The Jerusalem Post*, 16 November 2020.

Setyo Widagdo, Hanif Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, 2008, Malang, Bayu Media Publishing, Hlm 56

Shmuel Trigano, "The Abraham Accords: Contrasting Reflections," Maret 2021.

Tamir Sinai and Tova Norlen, "The Abraham Accords – Paradigm Shift or Realpolitik?" (George C. Marshall European Center For Security Studies), Oktober 2020.

Tamir Sinai and Tova Norlen, "The Abraham Accords – Paradigm Shift or Realpolitik?" (George C. Marshall European Center For Security Studies), Oktober 2020.

Tom Allinson, "Israel-Iran Conflict to Be Major Middle East Issue in 2020," Deutsche Welle, 2 Januari 2020.

Udi Dekel and Noa Shusterman, "Behind the Scenes of the Abraham Accords: Insights from an INSS Cabinet," The Institute for National Security Studies, September 24, 2020.

Umar S. Bakry, *opcit.* hal.171.

Vivian Yee, "U.A.E. Becomes First Arab Nation to Open a Nuclear Power Plant," The New York Times, 1 Agustus 2020.

W.Thomas Robinson, *A National Interest Analysis Of Sino-Soviet Relations*, University of Arizona, Arizona, (1967), hal. 183.

William A. Rugh, *The Foreign Policy of the United Arab Emirates*, *Jurnal Timur Tengah*, Vol. 50, No. 1 (Winter, 1996), hal. 54.

Zaha Hassan, "The Israel-UAE Accord Is a Mere Sideshow," *Carnegie Endowment for International Peace*, 19 Agustus 2020.

### **Berita**

Albalad.co, *Kekuatan Militer Enam Negara Teluk*, 2017, <https://albalad.co/kabar/2017A7278/kekuatan-militer-enam-negara-arab-teluk/>, [Diakses 27 Mei 2021].

Albawaba News, Advanced Integrated Systems (AIS) and the German Research Institute for the Artificial Intelligence (DFKI) will work together on integrated solutions, [Diakses 1 juni 2021].

BBC News, "Krisis Negara Islam: Australia akan Mengirim 600 Pasukan ke UEA," 14 September 2014. [Diakses 27 Juni 2021].

CNN Indonesia, Perang dengan Hizbullah, Israel Bisa Diserang 2.000 Roket,  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/202103171111112-120-618515/perang-dengan-hizbullah-israel-bisa-diserang-2000-roket>.  
 [Diakses 8 Juni 2021].

CNN Indonesia, Ulama Syiah Iran Pendiri Hizbullah Meninggal karena Covid, Juni 2021,  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210608142844-120-651732/ulama-syiah-iran-pendiri-hizbullah-meninggal-karena-covid>,  
 [Diakses 8 Juni 2021].

Courtney Freer, "Ikhwanul Muslimin di Emirat: Anatomi Tindakan Keras",  
 Mata Timur Tengah, 17 Desember 2015,  
<https://www.middleeasteye.net/big-story/muslim-brotherhood-emirates-anatomy-crackdown>, [ Diakses 24 Juni 2021].

Dario Cristiani, Milisi Zintan dan Negara Libya Terfragmentasi, Isu Panas (Washington, D.C.: The Jamestown Foundation, 19 Januari 2012), unggahan [https://jamestown.org/wp-content//2012/01/Zintan\\_Brigade\\_Grey.pdf?x10484](https://jamestown.org/wp-content//2012/01/Zintan_Brigade_Grey.pdf?x10484). [ Diakses 26 Juni 2021].

David D. Kirkpatrick dan Eric Schmitt, "Arab Nations Strike in Libya, Surprising U.S.", *The New York Times*, 25 Agustus 2014, <http://www.nytimes.com/2014/08/26/world/africa/egypt-and-united-arab-emirates-said-to-have-secretly-dilakukan-libya-airstrikes.html>. [Diakses 26 Juni 2021].

Eddie Boxx, *Countering the Iranian Missile Threat in the Middle East*, Washington Institute for Near East Policy, Oktober, 2012, <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/countering-iranian-missile-threat-middle-east>, [Diakses 20 Juni 2021].

Eddie Boxx, *Countering the Iranian Missile Threat in the Middle East*, Washington Institute for Near East Policy, Oktober, 2012, <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/countering-iranian-missile-threat-middle-east>, [Diakses 26 Mei 2021].

Emirates, *Security expo closes with mega contracts*, Maret 2008, <https://www.emirates247.com/eb247/news/security-expo-closes-with-mega-contracts-2008-03-05-1.214771>, [Diakses 30 Mei 2021].

Forbes Timur Tengah "UEA Memperluas Paket Bantuan Ekonomi AED 3 Miliar Ke Yordania.", 9 Oktober 2018. [Diakses 27 Juni 2021].

Haaretz, *Haaretz Investigation: Secret Flight Operating Between Israel and Gulf State*, Desember 2015, <https://www.haaretz.com/mystery-plane-plying-israel-gulf-route-1.5338820>, [Diakses 30 Mei 2021].

Haaretz.com, "Exclusive: Netanyahu Secretly Met With UAE Foreign Minister in 2012 in New York," (25 July 2017), <https://www.haaretz.com/israel-news/netanyahu-secretly-met-with->

uae-foreign-minister-in-2012-in-new-york-1.5432342, [Diakses 8 Juni 2021].

Haaretz.com, "Exclusive: Netanyahu Secretly Met With UAE Foreign Minister in 2012 in New York,"(25 July 2017), <https://www.haaretz.com/israel-news/netanyahu-secretly-met-with-uae-foreign-minister-in-2012-in-new-york-1.5432342>, [Diakses 9 Mei 2021].

Human Rights Watch, UAE: Cybercrimes Decree attack Free Speech, <https://www.hrw.org/news/2012/11/28/uae-cybercrimes-decree-attacks-free-speech>, November 2012, [Diakses 31 Mei 2021].

Ibrahim Jalal, "UEA mungkin telah menarik diri dari Yaman, tetapi pengaruhnya tetap kuat," Institut Timur Tengah, 25 Februari 2020.

Imad K. Harb, "Penjelasan Ekonomi untuk Keberpihakan Mesir dalam Krisis GCC" (Washington, D.C.: Arab Center Washington DC, 9 Agustus 2017), [http://arabcenterdc.org/policy\\_analyses/an-economic-explanation-for-egypts-alignment-in-the-gcc-crisis/](http://arabcenterdc.org/policy_analyses/an-economic-explanation-for-egypts-alignment-in-the-gcc-crisis/). [Diakses 24 Juni 2021].

Joanna Paraszczuk, Iran Inaugurates New Naval Base in Strait of Hormuz, The Jerusalem Post, November, 2012, <https://www.jpost.com/Iranian-Threat/News/Iran-inaugurates-new-naval-base-in-Strait-of-Hormuz>, [Diakses 19 Juni 2021].

Joanna Paraszczuk, Iran Inaugurates New Naval Base in Strait of Hormuz, The Jerusalem Post, November, 2012,

<https://www.jpost.com/Iranian-Threat/News/Iran-inaugurates-new-naval-base-in-Strait-of-Hormuz>, [Diakses 26 Mei 2021].

Kedutaan Besar Israel untuk Amerika Serikat, Pidato PM Netanyahu di PBB, 10 Januari 2013,

<https://www.israelemb.org/washington/NewsAndEvents/Pages/PM-Netanyahu-Speech-at-the-UN.aspx>, [Diakses 29 Mei 2021].

Kompas, Israel-UEA jalin Kembali hubungan diplomatik, ini respon beberapa negara, (14 Agustus 2020),

<https://www.kompas.com/global/read/2020/08/14/144524370/israel-uea-jalin-kembali-hubungan-diplomatik-ini-respons-beberapa-negara?page=all> , [Diakses 4 Mei 2021].

Kompas.com, "Bentuk Kerja Sama Internasional: Bilateral, Regional, dan Multilateral", (19Desember2019,

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/19/180000269/bentuk-kerja-sama-internasional-bilateral-regional-multilateral?page=all>, [Diakses 5 Mei 2021].

Kompas.com, "Bentuk Kerja Sama Internasional: Bilateral, Regional, dan Multilateral", (19 Desember 2019),

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/19/180000269/bentuk-kerja-sama-internasional-bilateral-regional-multilateral?page=all>, [Diakses 5 Mei 2021].

Kompas.com. Sejarah Hubungan Iran-Israel: dari Bersekutu hingga Jadi Lawan Mematikan, April 2021,

<https://internasional.kompas.com/read/2021/04/16/121149270/sejara>

h-hubungan-iran-israel-dari-bersekutu-hingga-jadi-lawan?page=all,  
[Diakses 6 Juli 2021].

Mahmoud Habboush, Iran Occupation of Gulf Islands “Shameful Minister”.  
Says Minister, The National, April, 2010,  
<https://www.thenationalnews.com/uae/iran-s-occupation-of-gulf-islands-shameful-says-minister-1.501529>, [Diakses 19 Juni 2021].

Mahmoud Habboush, Iran Occupation of Gulf Islands “Shameful Minister”.  
Says Minister, The National, april, 2010,  
<https://www.thenationalnews.com/uae/iran-s-occupation-of-gulf-islands-shameful-says-minister-1501>, [Diakses 26 Mei 2021].

MEE, Falcon Eye: The Israeli-installed mass civil surveillance system of  
Abu Dhabi, Juli 2015, <https://www.middleeasteye.net/news/falcon-eye-israeli-installed-mass-civil-surveillance-system-abu-dhabi>,  
[Diakses 31 Mei 2021].

MEE, Secret flight linking Israel to the UAE reveals 'open secret' of  
collaboration, Februari 2015,  
<https://www.middleeasteye.net/news/secret-flight-linking-israel-uae-reveals-open-secret-collaboration>, [Diakses 30 Mei 2021].

Merdeka.com, Q&A: Seluk Beluk Normalisasi Hubungan Israel dengan  
UEA dan israel, (23 September 2020),  
<https://www.merdeka.com/khas/qa-seluk-beluk-normalisasi-hubungan-israel-dangan-uea-dan-bahrain.html> , [Diakses 4 Mei  
2021].

MFA.gov.il. GUIDE TO THE MIDEAST PEACE PROCESS, 22 Agustus 2000,

<https://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/guide%20to%20the%20mideast%20peace%20process.aspx>, [ Diakses 28 Juni 2021].

New York Times "Pasukan Yaman Menargetkan Kubu Qaeda.",7 Agustus 2017. [Diakses 27 Juni 2021].

New York Times, "Operasi yang Dipimpin oleh U.A.E. Membebaskan Sandera Amerika di Yaman.", 7 Maret 2019. [ Diakses 27 Juni 2021].

Qatar News Agency , "Joint Statement of US-GCC Foreign Ministers' Meeting," , Agustus, 2015, <http://www.qna.org.qa/en-us/News/15080401100067/Joint-Statement-of-US-GCC-Foreign-Ministers-Meeting>, [Diakses 21 Juni 2021].

Qatar News Agency , "Joint Statement of US-GCC Foreign Ministers' Meeting," , Agustus, 2015, <http://www.qna.org.qa/en-us/News/15080401100067/Joint-Statement-of-US-GCC-Foreign-Ministers-Meeting>, [Diakses 27 Mei 2021].

Reuters, "Saudi Remains Committed to Arab Peace Initiative for Israel Peace, Foreign Minister Says," , 19 Agustus 2020, <https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-saudi-idUSKCN25F1TQ>, [Diakses 9 Juni 2021].

Reuters,"UEA membuka kembali kedutaan Suriah dalam dorongan untuk Assad.", 27 Desember 2018. [ Diakses 27 Juni 2021].



The New York Times, Palestinian Says His Delegation Will Assert PLO Ties at Talks, 22 Oktober 1991. [Diakses 28 Juni 2021].

The New York Times, Secret Desert Force Set Up By Blackwater's Founders, Mei 2011, [https://www.nytimes.com/2011/05/15/world/middleeast/15prince.html?pagewanted=all&\\_r=0](https://www.nytimes.com/2011/05/15/world/middleeast/15prince.html?pagewanted=all&_r=0), [Diakses 31 Mei 2021].

The Washington Institute for Near East Policy, "How the Abraham Accords Look Forward, Not Back," David Makovsky 16 September 2020, <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/how-abraham-accords-look-forward-not-back>, [Diakses 28 Juni 2021].

The Washington Post, "Assad Suriah, putra mahkota Abu Dhabi berbicara di telepon: Media negara." Straits Times, 28 Maret 2020; Bassem Mroue, "UEA mengirim bantuan Suriah untuk membantunya melawan penyebaran virus corona," 8 April 2021. [Diakses 27 Juni 2021].

The Washington Post, "Pasukan AS untuk Tinggal Lebih Lama di Yaman untuk Melawan al Qaeda.", 18 Juni 2016. [Diakses 27 Juni 2021].

The White House, "U.S. – Gulf Cooperation Council Camp David Joint Statement," Mei, 2015, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/05/14/us-gulf-cooperation-council-camp-david-joint-statement>, [Diakses 21 Juni 2021].

The White House, "U.S. – Gulf Cooperation Council Camp David Joint Statement," Mei, 2015, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/05/14/us-gulf-cooperation-council-camp-david-joint-statement>, [Diakses 21 Juni 2021].

press-office/2015/05/14/us-gulf-cooperation-council-camp-david-joint-statement, [Diakses 27 Mei 2021].

Thomas Erdbrink, A Tiny Island is Where Iran Makes a Stand, *The New York Times*, [https://www.nytimes.com/2012/05/01/world/middleeast/dispute-over-island-of-abu-musa-unites-iran.html?\\_r=0](https://www.nytimes.com/2012/05/01/world/middleeast/dispute-over-island-of-abu-musa-unites-iran.html?_r=0) April 2012. [Diakses 19 Juni 2021].

Thomas Erdbrink, A Tiny Island is Where Iran Makes a Stand, *The New York Times*, [https://www.nytimes.com/2012/05/01/world/middleeast/dispute-over-island-of-abu-musa-unites-iran.html?\\_r=0](https://www.nytimes.com/2012/05/01/world/middleeast/dispute-over-island-of-abu-musa-unites-iran.html?_r=0) April 2012. [Diakses 26 Mei 2021].

U.S. Department of State, “Joint Comprehensive Plan of Action,” July 14, 2015, <https://www.state.gov/>. [Diakses 20 Juni 2021].

U.S. Department of State, “Joint Comprehensive Plan of Action,” July 14, 2015, <https://www.state.gov/>. [Diakses 27 Mei 2021].

UPI.com, Emirates has security links with Israel, januari 2012, <https://www.upi.com/Defense-News/2012/01/27/Emirates-has-security-links-with-Israel/73471327687767/?ur3=1>, [Diakses 1 juni 2021].

Uzi Rabi dan Chelsi Mueller, “Negara-Negara Teluk Arab dan Israel sejak 1967: Dari 'Tanpa Negosiasi' menjadi Kerjasama Tacit,” *British Journal of Middle East Studies* 44 (4), 2017, hlm. 576-592.

Wolfram Lacher, *Garis Patahan Revolusi. Aktor Politik, Kamp dan Konflik di Libya Baru*, Makalah Penelitian SWP 4/2013 (Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Mei 2013), 19, <https://www.swp-berlin.org/en/publication/libya-fault-garis-of-the-revolusi>. [Diakses 26 Juni 2021].

Ynetnews, "Annexation Will Be a Serious Setback for Better Relations with the Arab World," 12 Juni 2020, <https://www.ynetnews.com/article/H1Gu1ceTL>, [Diakses 29 Juni 2021].

Yoel Guzansky, "The Gulf States, Israel and Hamas," Anat Kurz, Udi Dekel dan Benedetta Berti (eds.), *The Crisis in the Gaza Strip: Response to the Challenge* (Tel Aviv: Institute for National Security Studies, 2018).

## BIODATA SINGKAT



Nama : Kristian Fajar Zai  
 Tempat/Tgl Lahir : Sisobandrao, 17 September 1998  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Katolik  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 No. Handphone : 082114893448  
 E-mail : fajarnakho@gmail.com  
 Nama Ayah : Asanudi Zai  
 Nama Ibu : Samsuani Hulu  
 Alamat Rumah : jln. Desa Sisobadrao, Kec. Madrehe Barat, Kab.  
 Nias Barat, Prov. Sumatera Utara

### Riwayat Pendidikan Formal :

1. 2004 – 2010 : SDN 076095 Hilidaura
2. 2010 – 2013 : SMPN 1 Sirombu
3. 2013 – 2016 : SMAN 1 Sirombu
4. 2017 – 2021 : Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jayabaya

### Pengalaman Organisasi :

1. 2018 – 2019 : Anggota Divisi Eksternal HIMAHIFISIP Universitas Jayabaya

### Pengalaman Kerja :

1. Februari 2020-Maret 2020 : Magang Di DPD RI